



**RANCANGAN AKHIR RENJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG (DINPUTARU) KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, dan telah disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 125 sd Pasal 143, Lampiran Halaman 399 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak untuk satu tahun anggaran ke depan, yaitu tahun 2025. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan saran maupun kritik yang sifatnya membangun. Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak khususnya dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Demak



AMIR MAHMUD, S.Sos., M.T
NIP.19700316 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 34

2.3. Isu-isu Penting Penyelegaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....41

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 61

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 61

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINPUTARU

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional..... 62

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak 66

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan..... 68

4.2. Program Prioritas dan Rencana Implementasi..... 68

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting..... 98

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 98

5.3 Rencana Tindak Lanjut..... 99

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Pada tingkatan Perangkat Daerah (PD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan ruang lingkup waktu 1

(satu) tahun.

Menyikapi amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini merupakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap ke dua dalam ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

Pada tingkatan Perangkat Daerah (PD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dimana muatan yang terkandung dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan. Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2021-2026. Di samping itu tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Demak, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renja DINPUTARU). Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sekaligus penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2025. Oleh Karena itu, sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala Perangkat Daerah (PD) harus segera menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) masing-masing, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak harus segera menyusun dan menetapkan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak Tahun 2025.

Perumusan kebijaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana meliputi perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, air minum, drainase, bina konstruksi, bangunan gedung, penataan ruang dan pertanahan.

Dalam pembangunan di bidang sarana dan prasarana (jalan, jembatan, saluran irigasi, air minum, drainase, bina konstruksi, bangunan gedung, penataan ruang dan pertanahan), strategi yang harus dipakai adalah strategi pembinaan yang menampung secara serasi dan seimbang atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang dipergunakan diantaranya:

- a. Pendekatan pelayanan yaitu tugas pembinaan yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat pengguna sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, air minum, drainase, bina konstruksi, bangunan gedung, penataan ruang dan pertanahan.
- b. Pendekatan pengembangan wilayah pelayanan yaitu mengharapkan suatu pengembangan wilayah pelayanan melalui pembangunan atau peningkatan daerah baru dengan membuat serta membangun sarana dan prasarana baru yang sebelumnya tidak ada atau belum berkembang.

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, pembangunan di bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Demak harus selalu didukung dengan dana sehingga dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Semua itu diarahkan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Intervensi penanganan penurunan prevalensi stunting tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, dilaksanakan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, lokasi dilaksanakannya sesuai dengan SK Penetapan Lokasi Prioritas Penanggulangan Stunting di Kabupaten Demak.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rancangan Akhir renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah:

1. Memenuhi kebutuhan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah;
2. Rancangan Akhir renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak merupakan bagian dari dokumen pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur

yang berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan RPJMD Kabupaten Demak.

Tujuan penyusunan rancangan Akhir renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak tahun 2025 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di sektor Pembangunan Infrastruktur selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja PD
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun sampai dengan Tahun 2023 Menguraikan tentang kondisi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2023.
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Memuat tentang tujuan dan sasaran beserta target kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025 beserta kerangka pendanaannya.

BAB V

Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak tahun 2023 meliputi pelaksanaan rencana program, kegiatan dengan hasil rencana program kegiatan yang dikaitkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan realisasi program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mempunyai 4 (empat) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran di dukung oleh dua urusan yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pertanahan.

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak tahun 2023 adalah sebesar Rp 204.192.427.900,00 dengan penyerapan sebesar Rp 198.205.691.704,00. Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak melaksanakan 10 (sepuluh) Program 20 (dua puluh) kegiatan serta 69 (enam puluh sembilan) sub kegiatan.

Tujuan strategis meningkatnya pelayanan publik tiap Perangkat Daerah mempunyai indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat. Definisi operasional meningkatnya pelayanan publik tiap Perangkat Daerah adalah hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan. Target kinerja meningkatnya pelayanan publik tiap Perangkat Daerah tahun 2023 adalah 92,06 dengan realisasi sebesar 92,08 sehingga capainnya adalah sebesar 100,02 %.

Faktor pendukung ketercapaian tujuan meningkatnya pelayanan publik tiap Perangkat Daerah adalah dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas

pelayanan kepada publik. Meskipun capaian kinerja cukup tinggi namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah masih adanya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa sehingga jika tidak langsung tertangani dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Perangkat Daerah.

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian tujuan strategis meningkatnya pelayanan publik di tiap Perangkat Daerah adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus untuk memperbaiki berbagai kesalahan-kesalahan yang sering ditemui dan memberikan solusi terhadap pemecahan masalah.

Sasaran strategis terwujudnya pelayanan publik yang responsif mempunyai indikator kinerja persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti. Definisi operasional terwujudnya pelayanan publik yang responsif adalah jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah aduan masyarakat yang masuk dikalikan seratus persen. Target kinerja meningkatnya pelayanan publik tiap Perangkat Daerah tahun 2023 adalah 100 dengan realisasi sebesar 100 sehingga capainnya Ketercapaian indikator persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan indikator persentase pelayanan sesuai standar dengan alokasi anggaran Rp. 7.183.997.400,00 dan realisasi Rp. 5.671.758.664,00. Indikator indeks kepuasan masyarakat didukung 6 (enam) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Faktor Pendukung ketercapaian tujuan Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif adalah kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan, aturan yang menjadi landasan pelayanan, mekanisme kegiatan pelayanan untuk mencapai tujuan pelayanan, sarana dan fasilitas dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan. Meskipun capaian kinerja cukup tinggi namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah kurangnya kesadaran petugas, prosedur dan sistem yang tidak sesuai, sarana prasarana yang tidak memadai. Solusi/Rekomendasi/Tindak lanjut untuk Pencapaian Kinerja Sasaran adalah Pengembangan SDM, penyesuaian prosedur

dan sistem layanan, penyediaan sarana prasarana yang memadahi.adalah sebesar 100 %.

Tujuan strategis meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah mempunyai indikator kinerja nilai SAKIP DINPUTARU. Definisi operasional meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada tahun evaluasi. Target kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 adalah 79,22 (BB) dengan realisasi sebesar 76,40 (BB) sehingga capainnya adalah sebesar 96,44 %.

Faktor pendukung ketercapaian tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia yang berkualitas, manajemen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Meskipun capaian kinerja cukup tinggi namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah target belum seluruhnya tercapai, capaian kinerja belum seluruhnya meningkat dari tahun sebelumnya, informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan serta adanya perubahan dalam bobot penilaian dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Solusi / rekomendasi / tindak lanjut untuk pencapaian tujuan strategis meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah adalah melakukan monitoring secara berkala terhadap rencana aksi yang telah dibuat, melakukan pemantauan secara berkala atas pengukuran kinerja berdasarkan rencana aksi yang telah dibuat, melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang dibuat, melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi lengkap dengan capaian, hambatan dan rencana perbaikan kinerja serta alternatif perbaikan, meningkatkan kembali efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Sasaran strategis meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah mempunyai indikator kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target. Definisi operasional meningkatnya capaian sasaran strategis tiap

Perangkat Daerah adalah jumlah sasaran strategis yang mencapai target dibagi jumlah sasaran strategis dikalikan seratus persen. Target kinerja meningkatnya pelayanan publik tiap Perangkat Daerah tahun 2023 adalah 100 dengan realisasi sebesar 87,5% sehingga capainnya adalah sebesar 87,5%.

Faktor Pendukung ketercapaian tujuan meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah adalah adanya dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui program yang mendukung ketercapaian sasaran meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah. Faktor Penghambat ketercapaian tujuan Meningkatkan capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah adalah kurangnya SDM, dukungan sarana prasarana dan fasilitas dalam rangka mendukung kinerja belum memadai, dukungan pendanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan masih kurang serta ada salah satu sasaran yang tidak tercapai yaitu rasio kemantapan jalan. Solusi/Rekomendasi/Tindak lanjut untuk Pencapaian Kinerja Sasaran adalah Pengembangan SDM, penyediaan sarana prasarana yang memadai, mengusulkan anggaran pada pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan strategis meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan mempunyai indikator kinerja persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi. Definisi operasional Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan adalah rata-rata capaian akses penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi

Target kinerja Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan tahun 2023 adalah 92,12 dengan realisasi sebesar 93,82 sehingga capainnya adalah sebesar 101,85 %. Faktor pendukung ketercapaian tujuan meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan adalah adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung ketercapaian indikator persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Komitmen dari Pemerintah Daerah

dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bidang air minum dan sanitasi. Meskipun capaian kinerja cukup tinggi namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah regulasi, perencanaan serta manajemen yang belum optimal. Kondisi geografis Kabupaten Demak Sebagian berupa pesisir dengan potensi penurunan tanah yang tinggi, potensi air baku di wilayah Kabupaten Demak cenderung payau, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi karena topografi ataupun kondisi ekonomi.

Solusi / rekomendasi / tindak lanjut untuk pencapaian tujuan strategis meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan adalah dengan membuat rencana kegiatan, mencari alternatif pemanfaatan sumber air baku untuk wilayah pesisir, memaksimalkan pengolahan air baku, memfokuskan kegiatan pada rumah tangga yang belum berakses sanitasi dengan memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melaksanakan pembangunan tangki septik dengan desain sesuai kondisi lahan.

Sasaran strategis meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat mempunyai indikator kinerja persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi. Definisi operasional meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat adalah jumlah rata-rata capaian rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi. Target kinerja meningkatnya pelayanan publik tiap Perangkat Daerah tahun 2023 adalah 92,11 dengan realisasi sebesar 93,82 sehingga capainnya adalah sebesar 101,86 %.

Faktor pendukung ketercapaian sasaran meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat adalah adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung ketercapaian indikator persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Komitmen dari Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bidang air minum

dan sanitasi. Meskipun capaian kinerja cukup tinggi namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah regulasi, perencanaan serta manajemen yang belum optimal. Kondisi geografis Kabupaten Demak Sebagian berupa pesisir dengan potensi penurunan tanah yang tinggi, potensi air baku di wilayah Kabupaten Demak cenderung payau, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi karena topografi ataupun kondisi ekonomi.

Solusi / rekomendasi / tindak lanjut untuk pencapaian meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat adalah dengan membuat rencana kegiatan, mencari alternatif pemanfaatan sumber air baku untuk wilayah pesisir, memaksimalkan pengolahan air baku, memfokuskan kegiatan pada rumah tangga yang belum berakses sanitasi dengan memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melaksanakan pembangunan tangki septik dengan desain sesuai kondisi lahan.

Tujuan strategis meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah mempunyai indikator kinerja Cakupan aksesibilitas antar wilayah. Definisi operasional meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan adalah rata-rata capaian sasaran kinerja. Target kinerja meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan tahun 2023 adalah 76,21 % dengan realisasi sebesar 88% sehingga capainnya adalah sebesar 115,47%.

Sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten mempunyai indikator kinerja rasio kemantapan jalan Kabupaten. Definisi operasional meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten adalah kemantapan jalan Kabupaten kondisi mantap dibanding jumlah penduduk. Target kinerja meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten tahun 2023 adalah 1,67 dengan realisasi sebesar 0,67 sehingga capainnya adalah sebesar 40,12.

Rasio kemantapan jalan Kabupaten mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Realisasi rasio kemantapan jalan Kabupaten adalah sebesar 0,67. Dilihat dari tabel, dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan pada indikator rasio kemantapan jalan Kabupaten dari tahun 2021 ke tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD,

capaian rasio kemantapan jalan Kabupaten adalah sebesar 37,87%. Faktor pendukung ketercapaian sasaran meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten adalah adanya bantuan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung sasaran rasio kemantapan jalan Kabupaten melalui Program Penyelenggaraan Jalan, penggunaan beton sebagai material jalan sehingga umur jalan lebih tahan lama, dan sudah dilakukan survey investigasi kondisi jalan sehingga proses identifikasi jalan yang rusak lebih mudah dan berdampak pada penanganan perbaikan jalan. Perhitungan pada Tahun 2023 formulasi antara kemantapan jalan dan jumlah penduduk terbalik (seharusnya sesuai dengan definisi operasional, namun dalam perhitungan targetnya menggunakan formulasi jumlah penduduk dibanding dengan kemantapan rasio jalan).

Meskipun capaiannya sudah tinggi, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan. Permasalahan dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten adalah beban kendaraan yang melewati kelas jalan melebihi kapasitas atau tonase, hal ini mengakibatkan jalan lebih cepat rusak pada beberapa wilayah yang stabilitas tanahnya kurang. Adanya rob dan genangan air di jalan saat musim penghujan menyebabkan jalan banyak yang berlubang.

Solusi / rekomendasi / tindak lanjut untuk pencapaian meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten adalah melalui peningkatan jalan dan jembatan, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan, secara intens melaksanakan rapat koordinasi yang menghadirkan tim teknis, konsultan pengawas dan penyedia jasa guna membahas jadwal pelaksanaan pekerjaan yang paling efektif sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami keterlambatan. Untuk beberapa pekerjaan jalan beton dilakukan penambahan zat additive accelerator untuk mempercepat proses pengerasan beton dalam mencapai mutu yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi.

Ketercapaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten didukung oleh Program Penyelenggaraan Jalan yang diukur dengan indikator proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap, dengan realisasi

89,37 %. Anggaran pada program penyelenggaraan jalan adalah sebesar Rp 114.998.300.000,00 dengan realisasi Rp 114.131.191.961,00 atau sebesar 99,25 %.

Sasaran strategis meningkatnya kualitas saluran air memiliki dua indikator yaitu rasio jaringan irigasi dan persentase drainase dalam kondisi baik. Indikator rasio jaringan irigasi tahun 2023 mempunyai target sebesar 11,96 dengan realisasi 11,96. Dalam mencapai keberhasilan tersebut terdapat faktor pendukung diantaranya adalah adanya dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), adanya program unggulan daerah yang digunakan untuk melakukan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu juga terdapat faktor penghambat dalam mencapai keberhasilan, diantaranya adalah faktor daya rusak air yang mempercepat laju kerusakan jaringan irigasi dan faktor daya dukung tanah yang rendah sehingga menyebabkan mudah longsohnya tanggul saluran.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan konstruksi beton bertulang dalam membangun talud dan senderan, menggunakan konstruksi pancang bambu untuk meningkatkan daya dukung tanah. Strategi yang digunakan untuk mencapai jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah dengan melakukan pemeliharaan jaringan irigasi secara berkala, meningkatkan frekuensi pemeliharaan jaringan irigasi secara berkala, mempersiapkan usulan kegiatan yang dapat didanai dengan anggaran pusat dan anggaran provinsi, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat/petani yang tergabung dalam P3A untuk berkontribusi dalam menjaga aset irigasi.

Ketercapaian indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik didukung dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) diukur dengan indikator rasio jaringan irigasi target 11,96 dan realisasi 11,96 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.604.750.500,00 dan realisasi sebesar Rp 9.482.548.162,00 atau 98,73%.

Indikator kedua yaitu persentase drainase dalam kondisi baik tahun 2023 mempunyai target 89,12% dengan realisasi 90,12%. Realisasi indikator persentase drainase dalam kondisi baik tahun 2023

adalah sebesar 90,12 % dari target 89,12%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak berhasil. Dalam mencapai keberhasilan tersebut terdapat faktor pendukung, diantaranya adalah adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase secara berkala dan adanya kebijakan Pemerintah Daerah melalui penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah Kabupaten Demak dan rencana penanganan kawasan rawan banjir. Disamping itu juga terdapat faktor penghambat dalam pencapaian keberhasilan diantaranya adalah faktor geografis Demak Kota yang berupa dataran dan cekungan sehingga faktor kemiringannya rendah, semakin bertambahnya drainase tertutup di Demak Kota yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan.

Solusi untuk mencegah permasalahan tersebut adalah dengan cara melebarkan dimensi drainase agar dapat berfungsi sebagai penampung sementara sebelum mengalir ke sungai (main drain) dan meningkatkan pemeliharaan drainase khususnya pada drainase yang tertutup. Strategi yang digunakan untuk mencapai drainase dalam kondisi baik adalah dengan meningkatkan kapasitas pintu air pengendali banjir dan akses ke sungai pembuang (main drain) serta dengan memetakan kembali sistem drainase yang memiliki potensi limpasan air.

Ketercapaian indikator persentase drainase dalam kondisi baik didukung dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 688.832.092,00 atau 68,88%. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan output Persentase drainase dalam kondisi baik.

Sasaran strategis yang ke tiga meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah. Indikator persentase partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah mempunyai target 25,7 dan terealisasi 25,7 dengan capaian 100,08%.

Faktor keberhasilan tersebut karena adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui program pengembangan jasa konstruksi.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan sub kegiatan pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Keberhasilan indikator persentase partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah adalah adanya dukungan dana dari pemerintah melalui program pengembangan jasa konstruksi serta Kerjasama dan Koordinasi antara Dinas dan pelaku badan usaha untuk meningkatkan program pengembangan jasa konstruksi. Disamping itu juga terdapat faktor penghambat dalam pencapaian keberhasilan diantaranya adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil terkendala, minimnya staff/ tenaga ahli, data pendukung dan peralatan pada bina konstruksi guna menunjang program pengembangan jasa konstruksi.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu Badan usaha dimohon segera memperbaiki sistemnya sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 terkait dengan penyelenggaraan badan usaha bidang konstruksi dan jasa konstruksi serta menambahkan personel staff/tenaga ahli dan melengkapi peralatan pada bina konstruksi guna mengembangkan jasa konstruksi. Strategi yang dilakukan membentuk tim koordinasi dengan pelaku badan usaha/penyedia jasa, membuat forum diskusi dengan badan usaha untuk koordinasi tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dan Membuat database tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi (badan usaha, tenaga terampil, tenaga ahli, alat konstruksi, dll).

Sasaran strategis yang ke empat yaitu meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dengan indikator ketaatan terhadap RTRW. Indikator ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2023 mempunyai target sebesar 62,25% dengan realisasi 62,25%. Faktor keberhasilan tersebut karena adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui program penyelenggaraan penataan ruang, program penatagunaan tanah dan program penataan bangunan gedung.

Program penyelenggaraan penataan ruang mempunyai 1 (satu kegiatan) yaitu Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota. Program penyelenggaraan penataan ruang dengan output Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota mempunyai target 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 dokumen.

Keberhasilan indikator ketaatan terhadap RTRW ini adalah adanya dukungan dana dari pemerintah melalui program penyelenggaraan penataan ruang. Karena adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola ruang dan manfaatnya untuk menjaga ketertiban dan kelancaran secara prasarana. Disamping itu juga terdapat faktor penghambat dalam pencapaian keberhasilan diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengusulkan tambahan personil pada instansi terkait.

Program pendukung yang kedua adalah program penatagunaan tanah, program ini mempunyai 1 (satu kegiatan) yaitu Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota. Program penatagunaan tanah dengan output Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 100 dokumen dan terealisasi 101 dokumen.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator ini dikarenakan adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah melalui program penatagunaan tanah dan adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan dukungan Pemerintah dalam percepatan penerbitan sertifikasi tanah. Disamping itu juga terdapat faktor penghambat yaitu karena adanya tanah yang hilang karena rob. Solusi yang digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor

050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mengakibatkan penyesuaian program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak tahun 2021-2026.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Dinputaru

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
1	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi (Laporan)	1	0	1	1	100%	1	2	200%
1	3	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dok)	1	0	1	1	100%	1	2	200%
1	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1	1	100%		1	-
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
1	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50	270	250	250	100%	200	720	1440%
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	1	2	200%	1	7	700%
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	12	2	9	450%	8	29	1450%
1	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	60	5	17	340%	6	83	1383%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						-			-
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	18	1	33	3300%	1	52	5200%
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dok)	1	2520	1	12	1200%	1	2533	253300%
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	53	4	14	350%	3	70	3500%
1	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dok)	5636	1	1	9	900%	4658	4668	83%
1	3	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dok)	4	1	3	3	100%	4	8	200%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Unit)	81	82	60	38	63%	16	136	168%
1	3	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7	0	0	0	-	-	0	0%
1	3	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang disediakan (Unit)	3	0	1	1	100%	0	1	33%
1	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	30	37	2	6	300%	1	44	147%
1	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	57	57	31	54%	15	103	687%
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	-	0	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	-	0	0	0%
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	164	135	388	7	2%	1	143	87%
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	12	36	36	100%	36	84	233%
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	21	6	7	117%	1	29	2900%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara (Unit)	100	192	119	189	159%	100	481	481%
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	1	1	1	100%	1	3	150%
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	47	107	47	107	228%	47	261	555%
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
1	3	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	100	67	12	12	100%	100	179	179%
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	210		50	70	140%	210	280	133%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	10	7	11	157%	7	28	400%
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	6	1	1	100%	7	14	200%
1	3	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	17	1	7	1	14%	1	3	18%
						Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	0	0%	100	200	200%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah(Dok)	16	24	16	32	200%	16	72	450%
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dok)	4	4	4	1	25%	4	9	225%
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok)	2		2	8	400%	2	10	500%
1	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dok)	2		2	8	400%	2	10	500%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dok)	8	20	8	15	188%	8	43	538%
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan (Dok)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	179	161	151	145	96%	179	485	271%
1	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dok)	4	12	4	71	1775%	4	87	2175%
1	3	1	2.02		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0	1	0	0	-	0	1	-!
					Urusan Pertanahan									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat (%)	100	92,13	95	94,74	100%	95,56	282,43	282%
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tanah pemkab bersertifikat (Bidang)	100	306	100	100	100%	100	506	506%
2	10	10	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dok)	100	306	100	100	100%	100	506	506%
					Urusan Pekerjaan Umum									
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga berakses air minum (%)	87,59	85,58	100	87,64	88%	100	273,22	312%
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga memperoleh layanan air minum (Rumah tangga)	3600	6026	2460	2961	120%	1540	10527	292%
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dok)	1		3	1	33%	1	2	200%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	3	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM		0	1	0	0	0	0	1	#DIV/0!
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat (Sambungan Rumah)	1600	1852	300	179	60%	20	2051	128%
1	3	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang ditingkatkan (Sambungan Rumah)	2800	4420	1600	1203	75%	1050	6673	238%
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	100	100	100	100	100%	100	300	300%
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rumah tangga memperoleh layanan air limbah domestik (Rumah Tangga)	1312	2041	600	1977	330%	600	4618	352%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dok)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (RT)	2000	2041	600	2523	421%	350	4914	246%
1	3	5	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	20		20	30	150%	0	30	150%
1	3	5	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	1	1	1	100%	0	2	200%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	86,24	88,06	88,06	89,365	101%	88,06	265,485	308%
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik (m)	6542,86	805207	814910	826991	101%	786592,55	2418790,55	36968%
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dok)	24	22	3	7	233%	11	40	167%
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	4	758,345	12,02	32,41	270%	14,76	805,515	20138%
1	3	10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (Km)	4	0,45	0,76	0,256	34%	2,5	3,206	80%
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruks (Km)	2	1,497	5,75	3302,04	57427 %	8,3	3311,837	165592%
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)	3	2,162	2	1774,79	77165 %	1,29	1778,242	59275%
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun (m)	50	161,41	156	115,1	74%	81,5	358.01	716%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian (m)	30	0	42	41,905	100%	24	65.905	220%
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (m)	70	52,67	48	11,5	24%	9	73,17	105%
1	3	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen)	6	0	0	0	-	0	0	0%
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	94,11	64,17	75,99	78,38	103%	82,03	224,58	239%
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan rawan banjir yang terlindungi (km²)	138,06	101,86	112	110,91	99%	119,96	332,73	241%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	2	2.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dok)	4	0	4	2	50%	4	6	150%
1	3	2	201	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	3	0	0	0	-	0	0	0%
1	3	2	201	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	5	0	2	2	100%	0	2	40%
1	3	2	201	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (Unit)	2	1	1	1	100%	1	3	150%
1	3	2	201	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Unit)	3	0	0	0	-	1	1	33%
1	3	2	201	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (Km)	0,4	0,18	0,14	18,906	13504 %	0,09	19,176	4794%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	2	201	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unitt)	5	13	3	3	100%	3	19	380%
1	3	2	201	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	3		3	5	167%	3	8	267%
1	3	2	201	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (Km)	5	19,341	1,4	11,21	801%	1,4	31,951	639%
1	3	2	201	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3	4	0	0	-	3	7	233%
1	3	2	201	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	6	0	0	0	-	0	0	0%
1	3	2	201	58	Operasi dan Pemeliharaan <i>Check Dam</i>	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	4	0	4	7	175%	4	11	275%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	2	201	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	20	20	20	20	100%	20	60	300%
1	3	2	###		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi (Hektar)	1622	1562	1577	1568	99%	1592	4722	291%
1	3	2	202	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dok)	7	0	7	1	14%	7	8	114%
1	3	2	202	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (Km)	4	0	0	0	-	1,5	1,5	38%
1	3	2	202	5	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun (Km)	0	0,27	0	0	-!		0,27	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	2	202	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan (Km)	1	0	0	0	-	0,5	0,5	50%
1	3	2	202	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (Km)	1,2	0	0	0	-	0,6	0,6	50%
1	3	2	202	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	-	0	0	-
1	3	2	202	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Km)	1,25				-	0,625	0,625	50%
1	3	2	202	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	0,7	20,9	1,16	1,1	95%	0,387	22,387	3198%
1	3	2	202	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2	0	0	0	-	2	2	100%
1	3	2	202	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	2	0	0	0	-	1	1	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	2	201	63	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	20	20	20	20	100%	20	60	300%
1	3	6			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun	100	100	100	100	100%	100	300	300%
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	100	89,03	92,76	90,12	97%	91,92	271,07	271%
1	3	6	2.01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dok)	1	0	0	0	-	0	0	0%
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun (m)	1250	0	0	0	--	100	100	8%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	6	2.0 1	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1	0	1	1	100%	0	1	100%
1	3	6	2.0 1	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1	1	1	1	100%	0	2	200%
1	3	1 1			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan (%)	58	47,68	50,27	52,27	104%	52,85	152,8	263%
1	3	1 1	2.0 1		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan tenaga konstruksi (Kali)	4	1	2	1	50%	4	6	150%
1	3	1 1	2.0 1	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	100	100	100	64	64%	100	264	264%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Luas alih fungsi lahan (Angka)	0,05957671	0,059577	0,059576709	0,059576709	100%	0,059576709	0,17873012	300%
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen RTR (Dokumen)	3	1	3	2	67%	3	6	200%
1	3	12	2.01	1	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dok)	1	1	1	2	200%	1	4	400%
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Dok)	1	0	4	4	100%	0	4	400%
1	3	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	0	4	1	25%	4	5	125%
1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dok)	4	0	4	6	150%	4	10	250%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	0	5	3	60%	5	8	160%
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dok)	5	0	5	5	100%	5	10	200%
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan berizin (Angka)	0,00969659	0,02	0,0219	0,0219	100%	0,0219	0,06381781	658%
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan gedung dalam kondisi baik (Angka)	0,00156397	0,02	0,0219	0,0219	100%	0,001	0,04291781	2744%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2024	Perkiraan Realisasi Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d tahun 2024	Tingkat Realisasi Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dok)	8	41	15	20	133%	12	73	913%
1	3	8	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	17	5	1	1	100%	1	7	41%

Sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi (BANGDA) terdapat beberapa penambahan satuan pada sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Pada Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan terdapat perubahan capaian dari 20 SR menjadi 20 Liter/detik.

2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan terdapat perubahan capaian dari 1050 SR menjadi 3 Liter/detik.

3. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan terdapat perubahan capaian dari 100 meter menjadi 1 Sistem Drainase Perkotaan.

4. Pembangunan Jembatan terdapat perubahan capaian dari 81,5 meter menjadi 8 Jembatan.

5. Penggantian Jembatan terdapat perubahan capaian dari 24 meter menjadi 1 Jembatan.

6. Rehabilitasi Jembatan terdapat perubahan capaian dari 9 meter menjadi 2 Jembatan.

7. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan terdapat perubahan capaian dari 0 Dokumen menjadi 0,1 Km.

Program Pembangunan daerah Kabupaten Demak disusun dengan dasar pada program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026. Secara ringkas program unggulan pembangunan daerah yang akan mendukung masing-masing misi adalah sebagai berikut:

8. Peningkatan harmonisasi dan fasilitas kehidupan beragama;

9. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis “*Smart City*”;

10. Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah;

11. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;

12. Pengembangan inovasi daerah;

13. Perluasan Kawasan perkotaan;

14. Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/ pusat produksi;

15. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat;
16. Peningkatan keberdayaan perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Program unggulan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak tahun anggaran 2024 adalah Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah, Perluasan Kawasan perkotaan, dan Percepatan Pembangunan.

Implementasi peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah diimplementasikan dengan pelaksanaan rehabilitasi sungai. Perluasan kawasan perkotaan diimplementasikan melalui Pembangunan perluasan kawasan perkotaan yaitu dengan penyusunan *masterplan* penataan ini Kota Demak dan *masterplan* perluasan kawasan perkotaan. Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/ pusat produksi diimplementasikan melalui peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan Kabupaten, pembuatan *masterplan* penanganan banjir dan rob terpadu, rehabilitasi tanggul, penataan trotoar dan drainase kota, Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/ sanitasi serta sarana prasarana menuju objek wisata. Pelaksanaan program unggulan tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2023

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
2	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS 'SMART CITY'																	
f	Mall Pelayanan Publik (MPP)	Jumlah layanan yang beroperasi di Mall Pelayanan Publik	unit		22	1	5,857,192,750	0	-	0	-			0	-			
5	Pembangunan gedung MPP	Gedung MPP yang terbangun	Unit			1	5,857,192,750		-		-					1	5,857,192,750	08.201.02
3	PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH																	

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
b	Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS)	Persentase timbunan sampah yang tertangani pada TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	Unit			1	572,000,000	0	-	0	-			0	-			
3	Pembangunan TPS-3R	Jumlah TPS3R terbangun	unit			1	572,000,000											
d	Gerakan kali bersih	Panjang sungai di wilayah perkotaan yang terjaga kebersihannya	km	-		0	-	2.1	2,000,000,000	6.38	2,400,000,000	303.8095238	120	2.094	400,000,000			
2	Normalisasi sungai di wilayah perkotaan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi	km		2,1	0	-	2.1	2,000,000,000	6.38	2,400,000,000	303.8095238	120	2.094	400,000,000	8.474	2,800,000,000	02.201.46
6	PERLUASAN KAWASAN PERKOTAAN																	

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
a	Penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan	masterplan perluasan kawasan perkotaan yang tersusun	dokumen			1	-	1	200,000,000	1	100,000,000	100	50	0	-			
1	Masterplan Perluasan Kawasan Perkotaan Demak	Dokumen Masterplan yang tersusun	dokumen			1		1	200,000,000	1	100,000,000	100	50			2	100,000,000	12.201.01
c	Pembangunan perluasan kawasan perkotaan	Jumlah lokasi perluasan kawasan perkotaan yang ditata	Lokasi			2	248,311,210	0	-	0	-			0	-			
1	Penyusunan DED Perluasan Kawasan Perkotaan	Jumlah DED tersusun	Dokumen			2	248,311,210								-	2	248,311,210	
2	Pembangunan landmark	Landmark terbangun	Unit			0									-	0	-	

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
7	PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TERUTAMA DI KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN/ PUSAT PRODUKSI																	
a	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten	Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	km			384388.75	170,506,064,037		27,146,000,000	42144.55	120,261,078,001		443	5	25,840,625,000			
1	Perencanaan pembangunan/ rehabilitasi jalan dan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan	Dokumen	13	24	22	1,066,913,075	21	1,046,000,000	17	360,478,900	80.95238095	34			39	1,427,391,975	10.201.01
2	Pembangunan jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik	m	415	1.6	379982	74,800,455,200	800	4,000,000,000	35710	97,632,645,450	4463.75	2,441			415692	172,433,100,650	10.201.05
3	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan	m'	4	3.333	4371.75	3,134,54	3	5,000,00	6367.83	3,076,43	212261	62			10739.58	6,210,97	10.201.09

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
		kabupaten yang direhabilitasi					3,319		0,000		2,502						5,821	
4	Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	Unit	4	1	13	12,341,414,700	1	5,000,000,000	7	13,634,643,150	700	273		16,700,000,000	20	42,676,057,850	10.201.12
5	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang terehabilitasi	Unit	7	2		796,658,400	2	2,100,000,000	7	769,210,950	350	37	5	1,490,625,000	12	3,056,494,350	10.201.18
6	Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun	Km		6,25		78,366,079,343	3.25	10,000,000,000	35.72	4,787,667,049	1099.076923	48		7,650,000,000	35.72	90,803,746,392	10.201.05
c	Penanganan banjir dan rob	Luas kawasan terdampak banjir dan rob yang ditangani	Ha			316332.24	28,969,227,850		8,975,000,000	4425	3,332,990,000		37	1253.762	4,550,000,000			
1	Pembuatan masterplan penanganan banjir dan rob terpadu	Jumlah dokumen perencanaan teknis	dok	-	0	0	-	1	200,000,000	4	197,419,050	400	99	8	550,000,000	12	747,419,050	02.201.03

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (%)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
		konstruksi																
2	Pembangunan pintu air	Jumlah pintu air pengendali banjir yang terbangun	unit	-	0	0	-	2	400,000,000	2	398,282,000	100	100	0	-	2	398,282,000	02.201.11
3	Rehabilitasi pintu air	Jumlah pintu air pengendali banjir yang terehabilitasi	unit	4	5	13	91,638,600	3	500,000,000	3	494,964,600	100	99	4	750,000,000	20	1,336,603,200	02.201.26
4	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air pengendali banjir yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	-	0	0	-	3	600,000,000	5	597,152,000	166.666667	100	5	560,000,000	10	1,157,152,000	02.201.36

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
5	Pembangunan stasiun pompa banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang terbangun	unit	-	0	1	747,510,000	1	500,000,000	1	494,899,850	100	99	1	800,000,000	3	2,042,409,850	02.201.13
6	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang terpelihara	unit	-	4	0	-	1	25,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	02.201.55
7	Perbaikan tanggul sungai di kawasan rob	Panjang tanggul kritis saluran / sungai yang ter rehabilitasi	m	325	180	104	73,511,450	90	400,000,000	207	138,603,500	230	35	795.64	890,000,000	1106.64	1,102,114,950	02.201.24
8	Normalisasi sungai	Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi	m	33	1400	12946	9,662,513,000	1400	1,800,000,000	4200	797,669,000	300	44	420.122	600,000,000	17566.122	11,060,182,000	02.201.46
9	Koordinasi dan monev	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan SDA	kegiatan	-	3	2	766,573,000	3	150,000,000	3	214,000,000	100	143	20	400,000,000	25	1,380,573,000	02.201.63

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
		yang dilaksanakan																
10	Perbaikan jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik	m		1	303266	17,228,752,800	640	3,200,000,000			0	-			303266	17,228,752,800	10.201.05
11	Perbaikan jembatan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM		0.09	0.24	398,729,000	0.07	1,200,000,000			0	-			0.24	398,729,000	10.201.18
f	Rehabilitasi tanggul sungai	Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi	m	325	180	6545	733,526,500	6490	2,250,000,000	53140	2,081,342,000	818.798151	93	90	2,000,000,000			
1	Perbaikan tanggul sungai	Panjang tanggul kritis saluran / sungai yang terehabilitasi	m	325.00	180	150	37,892,500	90	400,000,000	30475	548,359,000	33861.11111	137	90	400,000,000	30715	986,251,500	02.201.24
2	Normalisasi sungai	Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi	m	33.00	1400	6395	695,634,000	1400	1,800,000,000	17665	1,524,583,000	1261.785714	85		1,600,000,000	24060	3,820,217,000	02.201.46
3	Pemantauan tanggul kritis	Panjang tanggul	m		5000			5000	50,000,0	5000	8,400,00	100	17			5000	8,400,00	02.201.24

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
		dimonitoring							00		0						0	
g	Penataan trotoar dan drainase kota	Panjang drainase kota dalam kondisi baik	km			10922.5	857,889,500	1.43	700,000,000	1425	688,832,092	99650.34965	98	0	100,000,000			
1	Penyusunan dokumen perencanaan drainase perkotaan	Dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	dok	2	1	0	-	1	100,000,000	0	-	0	-			0	-	06.201.01
2	Rehabilitasi drainase kota	Panjang drainase ter rehabilitasi	m	470	675	0	-	675	300,000,000	675	227,212,500	100	76			675	227,212,500	06.201.07
3	Operasi dan Pemeliharaan Drainase	Panjang saluran drainase perkotaan yang terpelihara	m	5	750	10922.5	857,889,500	750	300,000,000	750	461,619,592	100	154			11672.5	1,319,509,092	06.201.09
4	Pembangunan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainas	m		1250										100,000,000	0	100,000,000	06.201.05

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
	Perkotaan	Perkotaan yang Dibangun																
h	Sistem pengelolaan air minum (SPAM)	Persentase masyarakat yang terlayani air minum	%		87.59	6074	28,767,585,000	84.13	16,900,000,000	2961	19,465,658,008	3519.553073	115	965.9565	9,967,565,000			
1	Perencanaan pengelolaan SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dok		1	69		1	500.000.000	1	328,551,630	100	66	1	20,000,000	71	348,551,630	03.201.01
2	monev SPAM	Jumlah dokumen supervisi	Dok			69	548,000,000							1	308,000,000	70	856,000,000	03.201.02
3	Pembangunan SPAM	Jumlah Sambungan Rumah terbangun	SR		1600	1516	7,029,009,000	1640	8,200,000,000	179	4,113,732,378	10.91	50	75	750,000,000	1770	11,892,741,378	03.201.04

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
4	Peningkatan SPAM	Jumlah Sambungan Rumah terbangun	SR		2800	4420	21,190,576,000	1740	8,700,000,000	2781	15,023,374,000	159.83	173	889	8,889,565,000	8089.9565	45,103,515,000	03.202.06
i	Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi layak	%		100	3105	12,337,451,350	99.23	7,200,000,000	3526	18,534,484,659	3553.360879	257	2597.285714	14,153,000,000			
1	Perencanaan pengelolaan SPAL/sanitasi	Jumlah dokumen perencanaan sistem pengelolaan air limbah	Dok		1	10	247,795,295	1	500,000,000	1	210,047,726	100	42	1	404,000,000	12	861,843,021	05.201.01
2	Pembangunan SPAL/sanitasi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki septik	Unit		937.1154286	2041	11,172,683,005	729	5,100,000,000	2523	15,829,605,573	346.090535	310	1,921	13,449,000,000	6485.285714	40,451,288,578	05.201.06
3	Pemeliharaan SPAL/sanitasi	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah	m		500	1054	916,973,050	500	500,000,000	1	433,094,500	0.2	87	675	300,000,000	1730	1,650,067,550	05.201.10

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
		Domestik yang terpelihara																
4	Sosialisasi masyarakat	jumlah rumah tangga belum memiliki tangki septik yang ikut sosialisasi	Rumah Tangga		1000			1000	100,000,000	1000	68,350,000	100	68			1000	68,350,000	05.201.08
5	Pembangunan IPLT	Jumlah IPLT terbangun	Kegiatan					1	1,000,000,000	1	1,993,386,860	100	199			1	1,993,386,860	
j	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang Tersedia dan Terpelihara	unit	325	5	75.816	2,894,592,627	160	800,000,000	156	594,316,500	97.5	74	54.5	300,000,000			

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2022		2023						2024		Perkiraan realisasi s.d. 2024		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
3	Peningkatan jalan menuju objek wisata	Panjang jalan ke arah objek wisata dalam kondisi baik	m		320	75.816	2,894,592,627	160	800,000,000	156	594,316,500	97.5	74	54.5	300,000,000	286.316	3,788,909,127	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Demak untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dengan cara melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pemerintah Kabupaten meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Formula perhitungan Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum dijelaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum terdiri dari Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengeolaan air limbah domestik. Mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi

kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Penerima Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum terdiri atas rumah tangga diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. Rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik Kabupaten/Kota diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air. Pelaksanaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air dalam memenuhi ketersediaan air baku dalam mencapai ketersediaan aksesibilitas air minum mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Indikator	IKU	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	√			92.03	92.06	92.09	92.12	92.04	92.08	92.09	92.12	
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	√			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai SAKIP tiap OPD	√			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
4					78.97	79.22	79.47	79.72	75.6	76.4		79.72	
5	Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	√			91.1	92.12	93.15	94.17	92.79	93.82	93.15	94.17	
6	Presentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi	√			91.1	92.11	93.13	94.15	92.79	93.82	93.13	94.15	
7	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	√			76.65	74.45	76.21	77.97	101.99	88	76.21	77.97	
8	Rasio kemantapan jalan kabupaten	√			0.6	1.67	1.68	1.68	0.64	1.65	1.68	1.68	
9	Rasio jaringan irigasi	√			11.23	11.96	12.7	13.44	11.24	11.96	12.7	13.44	
10	Persentase drainase dalam kondisi baik	√			86.31	89.12	91.92	94.72	89.03	90.12	91.92	94.72	
11	Ketaatan terhadap RTRW	√			62.1	62.25	62.4	62.55	62.08	62.25	62.4	62.55	

12	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota		√		83.34	84.13	85.03	86.16	85.58	87.64	85.03	86.16	
13	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		√		99.03	99.23	99.42	99.74	100	100	99.42	99.74	
14	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota			√	48.83	53.17	57.51	61.85	94.9	100	60.44	61.85	
15	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota			√	36.61	43.17	43.79	47.09	94.9	100	56.62	47.09	
16	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			√	95.74	96.37	97.11	97.84	94.9	96.37	97.73	97.84	
17	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota			√	84.77	86.47	88.2	89.96	85.51	0	89.33	89.96	
18	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			√	47.68	50.27	52.85	46.47	47.69	52.27	52.85	46.47	

19	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			√	100	100	100	100	100	100	100	100	
20	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			√	84.77	86.47	88.2	89.96		0	88.2	89.96	
21	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk			√	0.000727	0.000708	0.000691	0.000674	0.000751	0.000751	0.000691	0.000674	
22	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)			√	84.77	86.47	88.2	89.96	36.45	36.45	88.2	89.96	
23	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)			√	45.77	46	46.24	46.47	45.53	45.53	46.24	46.47	
24	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar			√	11.41	11.36	11.3	11.24	0	0	11.3	11.24	
25	Persentase rumah tinggal bersanitasi			√	98.78	99.23	99.42	99.74	100	100	99.42	99.74	
26	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar			√	12.15	12.13	12.11	12.09	12.11	12.11	12.11	12.09	
27	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	√		√	86.31	89.11	91.91	94.71	89.03	90.12	91.91	94.71	
28	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor			√	48.96	68.48	88.73	94.36	119.04	119.04	88.73	94.36	
29	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan			√	83.41	84.13	85.03	88.41	85.58	87.64	85.03	88.41	

30	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan			√	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Rasio kepatuhan IMB kab/kota			√	0	0	0	89.96	100	100	0	89.96	
32	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli			√	47.68	50.27	52.85	89.96	0	0	52.85	89.96	
33	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			√	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.			√	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanab Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee			√	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Tersedianya tanah untuk masyarakat.			√	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi			√	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Persentase luas lahan bersertifikat			√	80.66	0	0	0	92.13	94.74	0	0	
39	Penyelesaian kasus tanah Negara			√	0	0	0	0	0	0	0	0	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, maka dapat dirumuskan permasalahan dan hambatan yang terjadi, diantaranya adalah:

- a. Belum semua masyarakat terlayani akses air minum;
- b. Belum tercapainya target capaian sanitasi;
- c. Masih banyaknya tonase melebihi kelas jalan, tingginya lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) dan keterbatasan kewenangan;
- d. Belum terbangunnya jalan poros desa;
- e. Kurang tersedianya alat-alat penunjang untuk kegiatan kebinamargaan;
- f. Kurang optimalnya kinerja sistem drainase;
- g. Keterbatasan sumber air;
- h. Kurang optimalnya sistem jaringan irigasi;
- i. Masih adanya kejadian limpasan air;
- j. Pengendalian dan pemenuhan kesesuaian ruang berdasarkan RTRW masih kurang;
- k. Belum semua urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan potensi Jalan Tol sebagai pintu gerbang dan pendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan ruang untuk pengembangan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan pengembangan permukiman;
- c. Pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa secara produktif;
- d. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- e. Pengaturan dan pengendalian kegiatan di kawasan pesisir untuk mengurangi dampak penurunan muka tanah, rob, dan abrasi;
- f. Pengembangan infrastruktur air minum dan air limbah di Kawasan permukiman untuk meningkatkan akses layanan yang memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesehatan;
- g. Pengembangan dan peningkatan lahan budidaya melalui peningkatan jaringan irigasi tambak dan irigasi pertanian.

Peluang bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- a. Pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat melalui pengembangan, penyehatan lingkungan permukiman berupa pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem pengolahan air limbah;
- b. Dukungan mobilitas yang menunjang sektor pariwisata, sektor produksi, sektor perdagangan dan jasa menjadi lebih mantap;
- c. Pengembangan proyek strategis nasional di kawasan pesisir Demak untuk mengurangi dampak abrasi, banjir dan rob;
- d. Percepatan implementasi program unggulan percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi.

Dalam proses perencanaan yang baik, sebelum melakukan perencanaan terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu-isu strategis terkait dengan bidang perencanaannya. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal tersebut dikarenakan isu-isu strategis dapat berpotensi menjadi permasalahan yang berarti bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dari hasil analisis, isu-isu penting yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Belum semua masyarakat terlayani air minum dan sanitasi;

2. Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang belum dalam kondisi baik dan memenuhi standar jalan Kabupaten;
3. Masih ditemukan genangan air di wilayah perkotaan saat musim penghujan;
4. Kurangnya ketersediaan air guna pemenuhan kebutuhan air baku dan air irigasi untuk pertanian;
5. Masih terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir Renja tahun 2025 bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengAkhir program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah:

1. Meningkatnya pelayanan sanitasi dan air minum untuk Masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten;
3. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah;
4. Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian;
5. Berkurangnya genangan air di wilayah perkotaan;
6. Berkurangnya alih fungsi lahan;
7. Meningkatnya jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Demak yang bersertifikat.

Anggaran rancangan Akhir renja tahun 2025 dan rancangan renja tahun 2025 terdapat perbedaan, yaitu sebesar Rp 231.429.642.500,00 terdiri dari 10 (sepuluh) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 86 (delapan puluh enam) sub kegiatan. Perbedaan pagu anggaran sub kegiatan antara rencana Akhir rencana kerja dengan rancangan rencana kerja, karena adanya penyesuaian terhadap program unggulan daerah dan belanja prioritas daerah. Rumusan program dan kegiatan yang berbeda antara ranwal renja dengan rancangan renja yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
 Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Dem ak	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (%)	100	12.881.024.625	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Dem ak	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (%)	100	14.149.239.833	
			Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (%)	100	21.100.540.000			Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (%)	100	19.832.324.792	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Dem ak	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah (Dokumen)	16	225.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Dem ak	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah (Dokumen)	16	225.000.000	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Dem ak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Dem ak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	60.000.000	
c	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000	
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	75.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah laporan keuangan (Dokumen)	1	20.875.540.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah laporan keuangan (Dokumen)	1	19.607.324.792	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	179	16.875.540.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	144	17.362.155.892	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Laporan)	4	4.000.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Laporan)	4	2.245.168.900	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi (Laporan)	1	125.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi (Laporan)	1	125.000.000	
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	125.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	125.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Demak	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (%)	100	823.850.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Demak	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (%)	100	823.850.000	
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	223.850.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	223.850.000	
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50	600.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	200	600.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Demak	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (%)	100	2.292.796.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Demak	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (%)	100	2.292.796.500	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	85.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	85.000.000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	230.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	230.000.000	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	230.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	230.000.000	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Demak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		199.650.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Demak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	199.650.000	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	19.965.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	19.965.000	
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1.326.341.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	1.326.341.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	51.840.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		51.840.000	
h	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5124,35	150.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	150.000.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Demak	Jumlah BMD yang diadakan (Unit)	81	3.700.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Demak	Jumlah BMD yang diadakan (Unit)	40	4.968.215.208	
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4	2.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	2.000.000.000	
b	Pengadaan Alat Besar	Kab. Demak	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)		-	Pengadaan Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)		0	
c	Pengadaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	30	200.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	20	200.000.000	
d	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	500.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
e	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	1.768.215.208	
f	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	500.000.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (%)	100	1.120.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (%)	100	1.120.000.000	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	218	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	218	20.000.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	900.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	900.000.000	
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	200.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak	Jumlah BMD yang terpelihara (Unit)	100	4.819.378.125	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak	Jumlah BMD yang terpelihara (Unit)	100	4.819.378.125	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	53.240.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	53.240.000	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	47	1.500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	47	1.500.000.000	
c	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Demak	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	133.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Demak	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	2	133.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
d	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	100	100.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	100	100.000.000	
e	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	210	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	200	200.000.000	
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	2.300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	2.300.000.000	
g	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	533.038.125	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	293.038.125	
h	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	240.000.000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Demak	Persentase rumah tangga berakses air minum (%)	100	18.500.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Demak	Persentase rumah tangga berakses air minum	85,03%	11.500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Rumah tangga memperoleh layanan air minum (Rumah Tangga)	3600	18.500.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Rumah tangga memperoleh layanan air minum (Rumah Tangga)	1540 Rumah Tangga	11.500.000.000	
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	500.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	500.000.000	Perencanaan SPAM
b	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Demak	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/detik)	20	10.000.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Demak	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/detik)	20	10.000.000.000	
c	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Demak	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/detik)	16	8.000.000.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Demak	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/detik)	2	1.000.000.000	
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. Demak	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	100	6.100.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. Demak	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	100	13.100.000.000	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Rumah tangga memperoleh layanan air limbah domestik (Rumah tangga)	1000	6.100.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Rumah tangga memperoleh layanan air limbah domestik (Rumah tangga)	1310	13.100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
a	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Demak	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Demak	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)		500.000.000	Peluasan lokasi pemeliharaan SPALD
b	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kab. Demak	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)	1000	5.000.000.000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kab. Demak	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)	1200	12.000.000.000	Penambahan rumah tangga penerima SPAL
c	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Demak	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	1000	100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Demak	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	0	0	
d	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	500.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	600.000.000	Digunakan untuk pemberdayaan masyarakat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Demak	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	85,54	86.700.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Demak	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	85,54	86.700.000.000	
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik (m)	4334,29	86.700.000.000	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik (m)	4334,29	86.700.000.000	
a	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	11	1.100.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	11	1.100.000.000	
b	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kab. Demak	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (Km)	10,885	300.000.000	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kab. Demak	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (Km)	10,885	300.000.000	
c	Penggantian Jembatan	Kab. Demak	Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)	2	20.000.000.000	Penggantian Jembatan	Kab. Demak	Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)	2	20.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
d	Pembangunan Jalan	Kab. Demak	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	3,5	21.000.000.000	Pembangunan Jalan	Kab. Demak	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	3,5	21.000.000.000	
e	Rekonstruksi jalan	Kab. Demak	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (Km)	1,852	15.000.000.000	Rekonstruksi jalan	Kab. Demak	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (Km)	1,852	15.000.000.000	
f	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Demak	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (Km)	5,533	8.300.000.000	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kab. Demak	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (Km)	5,533	8.300.000.000	
g	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Demak	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	9	3.000.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Demak	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	9	3.000.000.000	
h	Pembangunan Jembatan	Kab. Demak	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	1	13.000.000.000	Pembangunan Jembatan	Kab. Demak	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	1	13.000.000.000	
i	Rehabilitasi Jalan	Kab. Demak	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)	2	5.000.000.000	Rehabilitasi Jalan	Kab. Demak	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)	2	5.000.000.000	
V	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Demak	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	88,07	32.853.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Demak	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	88,07	32.853.500.000	
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Luas kawasan rawan banjir yang terlindungi	129	24.560.000.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Luas kawasan rawan banjir yang terlindungi (km²)	129	24.560.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
a	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Kab. Demak	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (Unit)	3	6.000.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Kab. Demak	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (Unit)	3	6.000.000.000	
b	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Demak	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	5	1.000.000.000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	5	1.000.000.000	
c	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	20	150.000.000	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Demak	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	20	150.000.000	
d	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Kab. Demak	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3	500.000.000	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Kab. Demak	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3	500.000.000	
e	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kab. Demak	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3	150.000.000	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3	150.000.000	
f	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3	600.000.000	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kab. Demak	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3	600.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
g	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Demak	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Dir estorasi (Km)	1,4	1.800.000.000	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Demak	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Dir estorasi (Km)	1,4	1.800.000.000	
h	Peningkatan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	Kab. Demak	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan (Unit)	3	660.000.000	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kab. Demak	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan (Unit)	3	660.000.000	
i	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Unit)	3	3.000.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Demak	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Unit)	3	3.000.000.000	
j	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	4	200.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	4	200.000.000	
k	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	2	6.000.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kab. Demak	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	2	6.000.000.000	
l	Pembangunan Pintu air/ bendung pengendali banjir	Kab. Demak	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	7	3.500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Kab. Demak	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	7	3.500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
m	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kab. Demak	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (Km)	0,2	1.000.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (Km)	0,2	1.000.000.000	
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi (Hektar)	1607	8.293.500.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi (Hektar)	1607	8.293.500.000	
a	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Demak	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (Km)	2	4.000.000.000	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Demak	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (Km)	2	4.000.000.000	
b	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Kab. Demak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun (Km)	0	-	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Kab. Demak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun (Km)	0	-	
c	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Kab. Demak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan (Km)	1	1.000.000.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Kab. Demak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan (Km)	1	1.000.000.000	
d	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Demak	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (Km)	0,6	1.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Demak	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (Km)	0,6	1.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
e	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kab. Demak	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Bendung)	0	-	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kab. Demak	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Bendung)	0	-	
f	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak		Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Km)	1,25	1.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Kab. Demak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Km)	1,25	1.000.000.000	
g	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Demak	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	0,387	193.500.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Demak	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	0,387	193.500.000	
h	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Kab. Demak	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendung)	2	100.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Kab. Demak	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendung)	2	100.000.000	
i	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Kab. Demak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	1	500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Kab. Demak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	1	500.000.000	
j	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	20	150.000.000	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	20	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
k	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	7	350.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	7	350.000.000	
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE	Kab. Demak	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Tidak Terjadi	5.200.000.000	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Kab. Demak	Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun	Tidak Terjadi	5.200.000.000	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Persentase drainase dalam kondisi baik	94,72	5.200.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Persentase drainase dalam kondisi baik	94,72	5.200.000.000	
a	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kab. Demak	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	6	300.000.000	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kab. Demak	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	6	300.000.000	
b	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Demak	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	18	4.500.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Demak	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	18	4.500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
c	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1	100.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1	100.000.000	
d	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab. Demak	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	10	300.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab. Demak	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	10	300.000.000	
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kab. Demak	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan (%)	55,43	1.000.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kab. Demak	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan (%)	55,43	1.000.000.000	
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Demak	Pelatihan tenaga konstruksi (Kali)	4	1.000.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Demak	Pelatihan tenaga konstruksi (Kali)	4	1.000.000.000	
a	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Demak	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	100	1.000.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Demak	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	100	1.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
VI II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. Demak	Luas alih fungsi lahan	0,059576709	2.800.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kab. Demak	Luas alih fungsi lahan	0,059576709	2.800.000.000	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Dokumen RTR	3	1.600.000.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Dokumen RTR	3	1.600.000.000	
a	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1.500.000.000	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1.500.000.000	
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Kab. Demak	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	1	100.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Kab. Demak	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	1	100.000.000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	1.000.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	1.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	1.000.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	1.000.000.000	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	200.000.000	
a	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	4	200.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	4	200.000.000	
IX	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Demak	Rasio bangunan berizin (Angka)	0,0219	60.000.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Demak	Rasio bangunan berizin (Angka)	0,0219	60.000.000.000	
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Demak	Rasio bangunan gedung dalam kondisi baik (Angka)	0,001251173	60.000.000.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Demak	Rasio bangunan gedung dalam kondisi baik (Angka)	0,001251173	60.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
a	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala(Bangunan Gedung)	2	2.000.000.000	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala(Bangunan Gedung)	2	2.000.000.000	
b	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	58.000.000.000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	58.000.000.000	3 Gedung Kecamatan, 1 Gedung DINPERKIM
X	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Demak	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat (%)	100	1.000.000.000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Demak	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat	100	1.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Tanah pemkab bersertifikat (Bidang)	100	1.000.000.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Tanah pemkab bersertifikat	100	1.000.000.000	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	1.000.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	100	1.000.000.000	Penambahan penataan dan legalisasi aset reforma agraria
JUMLAH					248.135.064.625	JUMLAH				248.135.064.625	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025 merupakan Rancangan Akhir Renja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2022-2026. Selain mengacu pada renstra, Rancangan Akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025 juga terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme Musrenbang dan Usulan DPRD. Daftar usulan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Demak

No	RENJA 2025				Catatan
	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
MUSRENBANG					
1	Peningkatan jalan ruas Demung-Trengguli	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.000.000.000,00	Diterima
2	Peningkatan Jalan Karangrowo - Kalianyar	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	500.000.000,00	Diterima
3	Pembangunan Talud Jalan Antar Kecamatan (Desa Doreng Kecamatan Wonosalam - Kecamatan Dempet)	Kab. Demak	Panjang jalan yang dibangun	500.000.000	Diterima
4	Rehabilitasi Saluran Air Ds. Wonosalam	Kab. Demak	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	500.000.000	Diterima
5	Penggantian Jembatan Antar Desa Kendaldoyong - Desa Tlogorejo	Kab. Demak	Jumlah jembatan yang diganti	350.000.000,00	Diterima
6	Rehabilitasi Saluran Air Ds. Karangrejo	Kab. Demak	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	400.000.000	Diterima
7	Penggantian Jembatan Sungai Barijah	Kab. Demak	Jumlah jembatan yang diganti	3.000.000.000,00	Diterima
8	Penataan Halaman Kantor Camat Sayung (Paving dan Drainase)	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	Ditolak
9	PENINGKATAN JALAN SIDOGEMAH-BEDONO (SODONG)	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.500.000.000,00	Diterima

No	RENJA 2025				Catatan
	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
10	Peningkatan Jalan Gemulak - Bedono (Daleman)	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	10.000.000.000,00	Diterima
11	Peningkatan Jalan Tugu - Timbulsloko	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.000.000.000,00	Diterima
12	Pembangunan Jembatan Perempatan Bulusari	Kab. Demak	Jumlah jembatan yang dibangun	1.000.000.000	Diterima
13	Peningkatan Jalan Penghubung Desa Purwosari - Desa Bedono	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.000.000.000,00	Diterima
14	Peningkatan Jalan Sriwulan - Bedono	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.000.000.000,00	Diterima
15	Peningkatan Jalan Gemulak - Sidorejo	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	750.000.000	Diterima
16	Peningkatan Jalan Dombo - Bulusari	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	500.000.000,00	Diterima
17	Rehabilitasi Afvour Pucanggading Lama	Kab. Demak	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	2.000.000.000	Diterima
18	Pembangunan Jembatan Ruas Banjarsari - Tugu	Kab. Demak	Jumlah jembatan yang dibangun	4.500.000.000,00	Diterima
19	Rehabilitasi Afvour Ds. Kedondong	Kab. Demak	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	200.000.000	Diterima
20	Pembangunan Talud jalan raya sepanjang Dusun Sudagaran sampai Dusun paesan	Kab. Demak	Panjang jalan yang dibangun	4.900.000.000,00	Diterima
21	Pembangunan Jalan Utama Desa Gebangarum	Kab. Demak	Panjang jalan yang dibangun	350.000.000,00	Diterima
22	Betonisasi Jalan Utama Penghubung Desa Krajanbogo, Kembangan, dan Karangrejo	Kab. Demak	Panjang jalan yang dibangun	700.000.000	Diterima
23	Peningkatan Jalan Gebang-Margolinduk	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.500.000.000	Diterima
24	Peningkatan Jembatan Penghubung Desa Serangan-Gojoyo	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	400.000.000,00	Diterima
25	Peningkatan Jembatan Desa Purworejo Kecamatan Bonang	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	800.000.000	Diterima
26	Peningkatan Jalan Margolinduk-Morodemak	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.000.000.000,00	Diterima
27	Rehabilitasi Kali Tuntang Lama Ds. Tlogoboyo	Kab. Demak	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	2.000.000.000	Diterima
28	Peningkatan Jalan Menuju Tambak Pintu Desa Morodemak	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	550.000.000,00	Diterima
29	Peningkatan Jalan Kebonsari-Kramat	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	2.400.000.000	Diterima
30	Normalisasi Afvour C.72	Kab. Demak	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	1.000.000.000	Diterima
31	Kecamatan Guntur belum memiliki gedung perpustakaan	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	-	Ditolak

No	RENJA 2025				Catatan
	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
			Daerah Kabupaten/Kota		
32	Pembangunan Talud Jalan Sarirejo-Wonorejo	Kab. Demak	Panjang jalan yang dibangun	1.000.000.000,00	Diterima
33	Rehabilitasi Pintu Air Ds. Blerong	Kab. Demak	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1.500.000.000	Diterima
34	Normalisasi Sungai B7	Kab. Demak	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	10.000.000.000	Diterima
35	Rehabilitasi Gedung Pertemuan Kecamatan Karangtengah	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	Diterima
36	Rehabilitasi Sekunder Gubug	Kab. Demak	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	500.000.000	Diterima
37	Betonisasi Jalan Utama Desa Wonokerto	Kab. Demak	Panjang jalan yang dibangun	500.000.000	Diterima
38	Normalisasi Kali Lobang	Kab. Demak	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	500.000.000	Diterima
39	Pembangunan jalan utama menuju Gojoyo	Kab. Demak	Panjang jalan yang dibangun	1.000.000.000	Diterima
40	Pembangunan Drainase jalan Raya Mutih Kulon-Tedunan	Kab. Demak	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	1.750.000.000,00	Diterima
41	Betonisasi Jalan Kendalasem - Tedunan	Kab. Demak	Panjang jalan yang dibangun	500.000.000,00	Diterima
42	Pembangunan Jembatan Desa Babalan- Desa Kedungmutih	Kab. Demak	Jumlah jembatan yang dibangun	11.000.000.000,00	Diterima
43	Peningkatan Jalan Antar Desa Banjarsari-Gedangalas	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	500.000.000,00	Diterima
44	pembangunan talud pendamping jalan Wilalung-Tanjunganyar (jalan Kabupaten)	Kab. Demak	Panjang jalan yang dibangun	500.000.000,00	Diterima
45	Pembangunan Pagar Keliling Kantor Kecamatan Karanganyar	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	Diterima
46	Pavingisasi Jalan Masuk Kantor Kecamatan Karanganyar	Kab. Demak	Panjang jalan yang dibangun	500.000.000	Diterima

No	RENJA 2025				Catatan
	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
47	Pelebaran Jalan Karanganyar-Mijen Km 7 Kab. Demak	Kab. Demak	Panjang jalan yang dilebarkan	1.000.000.000	Diterima
48	Cor U Avur C.72 (Desa Ngempikwetan, Wonorejo, Karanganyar)	Kab. Demak	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	-	Ditolak
49	Normalisasi sungai Avfour C 71 dan penambahan sipon/pelebaran (gorong-gorong dibawah jalan raya) di desa Gajah	Kab. Demak	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	500.000.000	Diterima
50	Pembangunan Talud Jalan Tuwang - Nglengkur	Kab. Demak	Panjang jalan yang dibangun	1.000.000.000	Diterima
51	Betonisasi Bandungrejo-Ngaluran - Karanganyar	Kab. Demak	Panjang jalan yang dibangun	1.000.000.000	Diterima
52	Talud sungai rowo juruh	Kab. Demak	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	-	Ditolak
53	Pembangunan Gapura masuk desa kedungwaru Kidul	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	Diterima
54	Pelebaran Jalan Karanganyar - Mijen Depan Desa Kotakan	Kab. Demak	Panjang jalan yang dilebarkan	1.000.000.000	Diterima
55	Rehabilitasi Ouster Leideng Kab. Demak TA 2024 Lanjutan	Kab. Demak	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	500.000.000	Diterima
56	Peningkatan Jalan Penghubung Wringinjar-Waru Kab. Demak	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.000.000.000,00	Diterima
57	Peningkatan Jalan Raya Bandungrejo - Mranggen	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.000.000.000	Diterima
58	Peningkatan Jalan Desa Mangunanlor ke arah Desa Mijen (Rusak)	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	1.200.000.000	Diterima
59	Penggantian Jembatan Jalan Protokol penghubung Desa Werdoyo ke Desa Babat	Kab. Demak	Jumlah jembatan yang diganti	500.000.000,00	Diterima
60	Peningkatan Jalan Antar Desa Solowire - Doreng	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	500.000.000,00	Diterima
61	Peningkatan Jalan Antar Desa Mijen - Klampok	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	3.120.000.000,00	Diterima
62	Peningkatan Jalan antar Desa Sarimulyo menuju Desa Tlogosih	Kab. Demak	Panjang jalan yang ditingkatkan	400.000.000,00	Diterima
63	Pembangunan Jalan Utama Desa Gebangarum	Kab. Demak	Panjang jalan yang dibangun	350.000.000,00	Diakomodir
64	Betonisasi Bandungrejo-Ngaluran - Karanganyar	Kab. Demak	Panjang jalan yang dibangun	500.000.000,00	Diakomodir

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan bidang pekerjaan umum yang diamanatkan dalam Undang - Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Dalam rangka keserasian pemanfaatan ruang, fungsi rencana tata ruang sebagai acuan dan alat koordinasi pembangunan untuk mengurangi konflik kepentingan baik antar sektor, antar daerah maupun antar kelompok akan ditingkatkan. Penataan ruang yang belum efektif menjadi salah satu penyebab masih tingginya proses konversi lahan pertanian ke non pertanian, khususnya di pulau Jawa. Dalam rangka menjaga daya dukung wilayah (*carrying capacity*) pulau Jawa, maka proses konversi lahan pertanian ke non pertanian (industri dan perumahan, dan infrastruktur), harus diminimumkan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah lebih lanjut terjadinya:
 - a. kerusakan lingkungan, termasuk bencana banjir;
 - b. kelangkaan sumber air bersih;
 - c. agglomerasi perkotaan yang tidak terkendali (*unmanageable urban agglomerations*). Selain itu proses konversi tersebut akan mengurangi kapasitas produksi pangan nasional.

Proses konversi lahan pertanian ke non pertanian harus dikendalikan melalui:

- a. pengawasan dan penerapan *law enforcement* tata ruang yang efektif;
 - b. penyeimbangan *land-rent* antara Jawa dan Luar Jawa dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah di luar Jawa;
 - c. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, termasuk kawasan industri di luar Jawa;
 - d. pengaturan insentif/disinsentif pemanfaatan lahan pertanian dan non-pertanian.
2. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan;
 3. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *land reform* serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah;
 4. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada:
 - a. Peningkatan kualitas pengelolaan aset (*asset management*) dalam penyediaan air minum dan sanitasi;
 - b. pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan

- d. penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
5. Sumber-sumber air dikelola dengan prinsip "*one river one management and one consolidated planning*" (suatu daerah aliran sungai dikelola oleh satu unit pengelola dan tidak berdasarkan batas-batas administrasi) dengan memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir sehingga terjadi keseimbangan kepentingan antar sektor, antar instansi pusat, antar wilayah provinsi, antar wilayah kabupaten/kota dan wilayah sungai, yang akhirnya dapat mewujudkan sinergi antar pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan mencegah konflik *horizontal* dan *vertical*;
6. Pengembangan sungai dan daerah aliran sungai dilakukan dengan meminimalisir tingkat sedimentasi sungai, menstabilkan kapasitas pengaliran air sungai dan bangunan pengendali banjir, mengurangi perbedaan aliran dasar sungai musim kemarau dan musim hujan menjaga dan menstabilkan kualitas dan kuantitas air di hulu dan hilir, memperbaiki daerah tangkapan air (*catchment area*), menyediakan bangunan pengendali sedimen, menyediakan waduk-waduk kecil untuk memenuhi kebutuhan air wilayah setempat pada daerah-daerah rawan kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun irigasi, membangun bangunan pengendali daya rusak air di Pantai;
7. Fungsi air sebagai *social goods* dan *economic goods* diseimbangkan melalui pengelolaan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang pekerjaan umum. Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	Indikator/Tujuan/Sasaran (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4		5		6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat	%	91,97	92	92,03	92,06	92,09	92,12	92,15	92,15
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti / Jumlah aduan yang masuk x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP tiap OPD	Laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP dari Inspektorat		BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
				Angka	78,74	78,72	78,72	78,97	79,22	79,72	79,97	79,97
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Jumlah sasaran strategis yang mencapai target / jumlah sasaran strategis x 100%	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN	Indikator/Tujuan/Sasaran (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	Rata-rata capaian akses penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	%	89,04	90,08	91,1	92,12	93,15	96,75	95,07	95,07
6	Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat	Presentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi	Rata-rata capaian rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi	%	89,04	90,08	91,1	92,11	93,13	96,01	95,04	95,04
7	Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	Rata-rata capaian sasaran kinerja	%	57,44	76,65	74,45	76,21	77,97	100	81,53	81,53
8	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Kemantapan jalan Kabupaten kondisi mantap / jumlah penduduk	Angka	0,35	0,34	0,60	1,67	1,68	1,68	1,69	1,69
9	Meningkatnya kualitas saluran air	Rasio jaringan irigasi	Panjang saluran irigasi kondisi baik / total luas DI	Angka	9,75	10,48	11,23	11,96	12,7	13,44	14,18	14,18
		Persentase drainase dalam kondisi baik	Panjang drainase kondisi baik / panjang total drainase x	%	80,71	86,31	86,31	89,12	91,92	94,72	97,52	97,52

NO	TUJUAN	Indikator/Tujuan/Sasaran (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
			100%									
10	Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah	Persentase Partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah	(0,4% Upah) + (0,4% Sertipikat) + (0,2% FHO)	%	22,34	24,15	24,67	25,7	26,74	27,77	28,8	28,8
11	Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW / Rencana peruntukan x 100%	%	61,9	61,95	62,1	62,25	62,4	62,55	62,7	62,7

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pencapaian visi Kabupaten Demak yaitu “Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Visi Bupati Demak diterjemahkan pada misi pembangunan Kabupaten Demak tahun 2021– 2026 menyatakan:

1. Memperkuat tata kelola Pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya;
2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dari ketiga misi Daerah Kabupaten Demak tersebut adalah misi ke 3 (tiga) yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

b. Pencapaian SDGs

No	Indikator SDGs	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi			Target				Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
1	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	%	80.08	82.98	85.58	87.64	84.13	85.03	86.16	87.59	87.59
2	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	%	98	98.15	100	100	99.23	99.42	99.74	100	100
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.				85.58	87.64	83.13	85.42	87.71	90	90
4	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan				18.09	20.51	83.13	85.42	87.71	90	90
5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.				77.81	79.06	96.67	97.78	98.89	100	100
6	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.				-		-	-	-	-	-
7	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.				-		-	-	-	-	-
8	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.				-		-	-	-	-	-
9	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur .				Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Indikator SDGs	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi			Target				Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
10	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.				8.47	-	8.9	9.34	9.81	10.3	10.3

c. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum, program penyelenggaraan jalan, program pengelolaan sumber daya air (SDA), program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program penyelenggaraan penataan ruang, program penataan bangunan gedung, program penatagunaan tanah, program pengembangan jasa konstruksi.

d. Capaian SPM

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.0
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2023

Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	312.272	273.687
Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	312.272	312.272

2. **Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:**

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja tahun 2025 adalah sebanyak 10 (sepuluh) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 86 (delapan puluh enam) sub kegiatan. Penyebaran lokasi program dan kegiatan tersebar ke seluruh Kabupaten Demak dengan pagu sebesar Rp. 231.429.642.500,00.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 22.092.174.500,00;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan pagu sebesar Rp. 29.465.000.000,00;

3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan pagu sebesar Rp. 300.000.000,00;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan pagu sebesar Rp 2.550.000.000,00;
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan pagu sebesar Rp 14.900.000.000,00;
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan pagu sebesar Rp 350.000.000,00;
7. Program Penataan Bangunan Gedung dengan pagu sebesar Rp 10.430.000.000,00;
8. Program Penyelenggaraan Jalan dengan pagu sebesar Rp 149.842.468.000,00;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan pagu sebesar Rp 1.300.000.000,00;
10. Program Penatagunaan Tanah dengan pagu sebesar Rp 200.000.000,00.

Anggaran rancangan akhir renja adalah sebesar Rp Rp. 231.429.642.500,00. yang terdiri dari 10 (sepuluh) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 86 (delapan puluh enam) sub kegiatan. Terdapat perbedaan pagu anggaran sub kegiatan antara rencana Akhir rencana kerja dengan rancangan rencana kerj. Sub kegiatan yang mengalami perubahan adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pemeliharaan/rehabilitasi saearan dan prasarana gedung kantor dan bangunann lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan, penyediaan sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat, penyusunan rencana kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD). Hal tersebut karena penyesuaian dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diprioritaskan.

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	19,747,324,792	21,100,540,000	18,157,174,500	-1,590,150,292	21,516,700,000	
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (%)	100	100	100	100	2,695,600,000	12,881,024,625	3,935,000,000	1,239,400,000	23,140,378,067	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah (Dokumen)	16	16	16	16	140,000,000	225,000,000	400,000,000	260,000,000	200,000,000	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4	4	37,500,000	75,000,000	150,000,000	112,500,000	75,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	2	40,000,000	60,000,000	75,000,000	35,000,000	60,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	2	15,000,000	15,000,000	25,000,000	10,000,000	15,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	8	8	8	8	47,500,000	75,000,000	150,000,000	102,500,000	50,000,000	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
		Kinerja SKPD (Laporan)										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan (Dokumen)	1	1	1	1	19,607,324,792	20,875,540,000	17,757,174,500	- 1,850,150,292	21,316,700,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	179	179	144	179	17,362,155,892	16,875,540,000	15,890,621,000	- 1,471,534,892	17,316,700,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Laporan)	4	4	4	12	2,245,168,900	4,000,000,000	1,866,553,500	- 378,615,400	4,000,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									-		

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi (Laporan)	1	1	1	1	15,000,000	125,000,000	15,000,000	-	25,000,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1	1	15,000,000	125,000,000	15,000,000	-	25,000,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	100	445,500,000	823,850,000	900,000,000	454,500,000	846,235,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	1	45,500,000	223,850,000	150,000,000	104,500,000	246,235,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	200	50	200	50	400,000,000	600,000,000	750,000,000	350,000,000	600,000,000	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	100	490,000,000	2,292,796,500	745,000,000	255,000,000	2,671,990,150	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	1	1	15,000,000	85,000,000	15,000,000	-	120,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2	3	2	50,000,000	230,000,000	60,000,000	10,000,000	439,230,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	6	6	6	50,000,000	230,000,000	55,000,000	5,000,000	200,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	-	-		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	1	50,000,000	199,650,000	60,000,000	10,000,000	219,615,000	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	1	10,000,000	19,965,000	10,000,000	-	21,961,500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	2	4	2	235,000,000	1,326,341,500	500,000,000	265,000,000	1,458,975,650	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4658	5124.35		5636	20,000,000	51,840,000	20,000,000	-	62,208,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	4	3	4	60,000,000	150,000,000	25,000,000	-35,000,000	150,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Unit)	71	81	76	81	30,000,000	3,700,000,000	734,400,000	704,400,000	13,700,000,000	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		4	3	7	-	2,000,000,000	400,000,000	400,000,000	3,500,000,000	
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)				3	-	-	-	-	5,000,000,000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	25	30	20	30	5,000,000	200,000,000	5,000,000	-	200,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	15	15	25,000,000	500,000,000	329,400,000	304,400,000	3,000,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	1	1	1	-	500,000,000		-	1,000,000,000	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	1	-	500,000,000		-	1,000,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (%)	100	100	100	100	865,000,000	1,120,000,000	615,000,000	-250,000,000	1,115,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	218	218	164	5,000,000	20,000,000	5,000,000	-	15,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	36	36	760,000,000	900,000,000	560,000,000	-200,000,000	900,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	1	100,000,000	200,000,000	50,000,000	-50,000,000	200,000,000	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara (Unit)		100	100	100	850,100,000	4,819,378,125	925,600,000	75,500,000	4,782,152,917	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	2	1,000,000	53,240,000	600,000	-400,000	119,102,917	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	47	47	47	47	304,100,000	1,500,000,000	450,000,000	145,900,000	1,331,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1	2	1	50,000,000	133,100,000	50,000,000	-	146,410,000	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	100	100	100	100	10,000,000	100,000,000	10,000,000	-	100,000,000	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	210	210	200	210	50,000,000	200,000,000	80,000,000	30,000,000	200,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	7	7	6	7	215,000,000	2,300,000,000	115,000,000	-100,000,000	2,300,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	7	7	1	7	20,000,000	533,038,125	20,000,000	-	585,640,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Unit)	1	1	1		200,000,000		200,000,000	-		
										-		
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga berakses air minum (%)	100	100	86,18	100	10,177,565,000	18,500,000,000	2,550,000,000	-7,627,565,000	22,500,000,000	Pemenuhan MCPKPK

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga memperoleh layanan air minum (Rumah Tangga)	2800	3600	3600	2250	10,177,565,000	18,500,000,000	2,550,000,000	-7,627,565,000	22,500,000,000	Pemenuhan MCPKPK
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	1	1	1	100,000,000	500,000,000		-100,000,000	500,000,000	Perencanaan SPAM
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/detik)	25	20	20	28	9,177,565,000	10,000,000,000	2,550,000,000	-6,627,565,000	14,000,000,000	Pemenuhan MCPKPK
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM									-		
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	3	16	2	16	900,000,000	8,000,000,000		-900,000,000	8,000,000,000	Sebagian besar daerah sudah memiliki akses SPAM

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
		(Liter/detik)										
										-		
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	100	100	99,74	100	14,367,263,000	6,100,000,000	14,900,000,000	532,737,000	11,100,000,000	Pemenuhan MCPKPK
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga memperoleh layanan air limbah domestik (Rumah tangga)	600	1000	1000	1110	14,367,263,000	6,100,000,000	14,900,000,000	532,737,000	11,100,000,000	Pemenuhan MCPKPK
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	1		1	300,000,000	500,000,000		-300,000,000	500,000,000	Peluasan lokasi pemeliharaan SPALD
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1407	1000	1200	1000	14,067,263,000	5,000,000,000	14,900,000,000	832,737,000	10,000,000,000	Penambahan rumah tangga penerima SPAL

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
		(Rumah Tangga)										
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	0	1000	0	1000	-	100,000,000	-	-	100,000,000	Pemenuhan MCPKPK
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	1	1	1	-	500,000,000		-	500,000,000	Digunakan untuk pemberdayaan masyarakat
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam	88.94	85.54	89.8294	86.24	169,262,640,000	86,700,000,000	149,842,468,000	-19,420,172,000	106,009,000,000	Prioritas Bupati

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
		kondisi mantap (%)										
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik (m)	3600	4.334,29	787.379,1426	6.542,86	169,262,640,000	86,700,000,000	149,842,468,000	-19,420,172,000	106,009,000,000	Prioritas Bupati
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	0	11	2	12	2,500,000	1,100,000,000	200,000,000	197,500,000	1,209,000,000	Prioritas Bupati
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (Km)	14.985	10.885	3,017	10.719	2,500,000	300,000,000	100,000,000	97,500,000	300,000,000	Prioritas Bupati

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)	1	2	2	2	700,000,000	20,000,000,000		- 700,000,000	20,000,000,000	Prioritas Bupati
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	1.322	3.5	3.5	3.667	7,650,000,000	21,000,000,000	27,750,000,000	20,100,000,000	22,000,000,000	Prioritas Bupati
	Rekonstruksi jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (Km)	13.068	1.852	1.852	1.852	142,007,640,000	15,000,000,000	115,292,468,000	- 26,715,172,000	15,000,000,000	Prioritas Bupati
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (Km)	0.595	5.533	5.533	5.2	900,000,000	8,300,000,000	1,200,000,000	300,000,000	7,800,000,000	Prioritas Bupati
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	1	9	9	15	400,000,000	3,000,000,000		- 400,000,000	5,000,000,000	Prioritas Bupati
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	9	1	1	2	16,700,000,000	13,000,000,000	4,100,000,000	- 12,600,000,000	29,700,000,000	Prioritas Bupati
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)	0.36	2	2	2	900,000,000	5,000,000,000	1,200,000,000	300,000,000	5,000,000,000	Prioritas Bupati
										-		
5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	82.03	88.07	88.07	94.11	11,928,000,000	32,853,500,000	29,465,000,000	17,537,000,000	48,510,000,000	Prioritas Bupati

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan rawan banjir yang terlindungi (km²)		129	129	138.06	10,518,000,000	24,560,000,000	28,365,000,000	17,847,000,000	34,410,000,000	Prioritas Bupati
	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (Unit)	1	3	3	2	800,000,000	6,000,000,000	700,000,000	- 100,000,000	4,000,000,000	Penanganan Pasca Banjir
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	3	5	5	5	750,000,000	1,000,000,000	100,000,000	- 650,000,000	1,000,000,000	Penanganan Pasca Banjir
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	20	20	20	20	150,000,000	150,000,000	225,000,000	75,000,000	150,000,000	Penanganan Pasca Banjir
	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	4	3	3	4	100,000,000	500,000,000	100,000,000	-	800,000,000	Penanganan Pasca Banjir

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	2	3	3	6	-	150,000,000		-	500,000,000	Penanganan Pasca Banjir
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3	3	3	3	100,000,000	600,000,000	100,000,000	-	600,000,000	Penanganan Pasca Banjir
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi /Direstorasi (Km)	1.4	1.4	1.4	5	7,368,000,000	1,800,000,000	25,165,000,000	17,797,000,000	10,000,000,000	Prioritas Bupati
	Peningkatan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan (Unit)	3	3	3	3	550,000,000	660,000,000	100,000,000	-450,000,000	660,000,000	Penanganan Pasca Banjir
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi (Unit)	1	3	3	3	100,000,000	3,000,000,000	100,000,000	-	3,000,000,000	Penanganan Pasca Banjir

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	4	4	4	4	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	Penanganan Pasca Banjir
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)		2	2	3	-	6,000,000,000	300,000,000	300,000,000	9,000,000,000	Penanganan Pasca Banjir
	Pembangunan Pintu air/ bendung pengendali banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	1	7	7	5	-	3,500,000,000	450,000,000	450,000,000	2,500,000,000	Penanganan Pasca Banjir
	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (Km)		0.2	0.2	0.4	400,000,000	1,000,000,000	500,000,000	100,000,000	2,000,000,000	Prioritas Bupati
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA	20	200	200		250,000,000	250,000,000	325,000,000			Prioritas Bupati

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi (Hektar)	1592	1607	1607	1622	1,410,000,000	8,293,500,000	1,100,000,000	- 310,000,000	14,100,000,000	Prioritas Bupati
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (Km)	1.5	2	2	4	100,000,000	4,000,000,000	100,000,000	-	8,000,000,000	Prioritas Bupati
	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun (Km)		0	0	0	-	-	-	-	-	Prioritas Bupati
	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan (Km)	0.5	1	1	1	100,000,000	1,000,000,000	100,000,000	-	1,000,000,000	Prioritas Bupati
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (Km)	0.6	0.6	0.6	1.2	100,000,000	1,000,000,000	100,000,000	-	2,000,000,000	Prioritas Bupati
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Bendung)		0	0	0	-	-	-	-	-	Prioritas Bupati
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	0.625	1.25	1.25	1.25	100,000,000	1,000,000,000	100,000,000	-	1,000,000,000	Prioritas Bupati

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
		(Km)										
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	0.387	0.387	0.387	0.7	300,000,000	193,500,000	250,000,000	-50,000,000	500,000,000	Prioritas Bupati
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendung)	2	2	2	2	60,000,000	100,000,000	50,000,000	-10,000,000	100,000,000	Prioritas Bupati
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	1	1	1	2	50,000,000	500,000,000	50,000,000	-	1,000,000,000	Prioritas Bupati
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	20	20	20	20	250,000,000	150,000,000		-250,000,000	150,000,000	Prioritas Bupati

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	7	7	7	7	350,000,000	350,000,000	350,000,000	-	350,000,000	Prioritas Bupati
										-		
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun (Nilai)	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	100,000,000	5,200,000,000	350,000,000	250,000,000	1,950,000,000	Prioritas Bupati
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	91.92	94.72	100	97.52	100,000,000	5,200,000,000	350,000,000	250,000,000	1,950,000,000	Prioritas Bupati
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	0	6	6	6	-	300,000,000		-	300,000,000	Prioritas Bupati

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1	18	18	5	100,000,000	4,500,000,000	150,000,000	50,000,000	1,250,000,000	Prioritas Bupati
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	0	1	1	1	-	100,000,000		-	100,000,000	Prioritas Bupati
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	0	10	10	10	-	300,000,000	200,000,000	200,000,000	300,000,000	Prioritas Bupati
										-		
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan	52.85	55.43		58.00	100,000,000	1,000,000,000	300,000,000	200,000,000	1,000,000,000	Prioritas Bupati

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
		dengan sertifikat pelatihan (%)										
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan tenaga konstruksi (Kali)	4	4		4	100,000,000	1,000,000,000	300,000,000	200,000,000	1,000,000,000	Prioritas Bupati
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	100	100		100	100,000,000	1,000,000,000		-100,000,000	1,000,000,000	Prioritas Bupati
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang dilatih (Orang)			100				300,000,000	300,000,000		Prioritas Bupati
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Luas alih fungsi lahan (Angka)	0.059576709	0.059576709	0.059576709	0.059576709	750,000,000	2,800,000,000	1,300,000,000	550,000,000	2,800,000,000	Pemenuhan MCPKPK

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen RTR (Dokumen)	3	3	3	3	310,000,000	1,600,000,000	475,000,000	165,000,000	1,600,000,000	Pemenuhan MCPKPK
	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	1	1	1	150,000,000	1,500,000,000	350,000,000	200,000,000	1,500,000,000	Pemenuhan MCPKPK
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)		1	1	1	160,000,000	100,000,000	125,000,000	-35,000,000	100,000,000	Pemenuhan MCPKPK
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	4	4	250,000,000	1,000,000,000	575,000,000	325,000,000	1,000,000,000	Pemenuhan MCPKPK
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	4	4	250,000,000	1,000,000,000		-250,000,000	1,000,000,000	Pemenuhan MCPKPK

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dok)			3				575,000,000			Pemenuhan MCPKPK
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Pemenuhan MCPKPK(Dokumen)	4	5	5	5	190,000,000	200,000,000	250,000,000	60,000,000	200,000,000	Pemenuhan MCPKPK
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	5	5	5	5	190,000,000	200,000,000	250,000,000	60,000,000	200,000,000	Pemenuhan MCPKPK
										-		

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan berizin (Angka)	0.0219	0.0219	0.0219	0.0219	7,285,000,000	60,000,000,000	10,430,000,000	3,145,000,000	47,928,200,000	Prioritas Bupati
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan gedung dalam kondisi baik (Angka)	0.00093838	0.001251173	0.001251173	0.001563966	7,285,000,000	60,000,000,000	10,430,000,000	3,145,000,000	47,928,200,000	Pemenuhan MCPKPK
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala(Bangunan		2	2	17	230,000,000	2,000,000,000	775,000,000	545,000,000	5,928,200,000	Pemeliharaan gedung pemerintah

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
		Gedung)										
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		6	6	8	7,055,000,000	58,000,000,000	9,655,000,000	2,600,000,000	42,000,000,000	3 Gedung Kecamatan, 1 Gedung DINPERKIM
										-		
10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat (%)	100	100	100	100	100,000,000	1,000,000,000	200,000,000	100,000,000	9,500,000,000	Pemenuhan MCPKPK
	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tanah pemkab bersertifikat (Bidang)	100	100	100	100	100,000,000	1,000,000,000	200,000,000	100,000,000	9,500,000,000	Pemenuhan MCPKPK
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	100	100	100	100	100,000,000	1,000,000,000	200,000,000	100,000,000	9,500,000,000	Penambahan penataan dan legalisasi aset reforma agraria

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana					Alasan Bertambah/ Berkurang
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Bertambah/ Berkurang	Renja 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13
		Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)					236,513,392,792	248,135,064,625	231,429,642,500	-5,083,750,292	295,954,278,067	

Dalam rangka aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan prevalensi stunting tahun 2025 sebesar 11,86%. pelaksanaan aksi konvergensi berhasil dan berdaya guna, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mendukung pelaksanaan aksi tersebut dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum / kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota / sub kegiatan peningkatan spam jaringan perpipaan di kawasan perdesaan dengan pagu sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan pembangunan perpipaan di kawasan perdesaan dengan pagu sebesar Rp 8.000.000.000,0.

4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Program Pembangunan daerah Kabupaten Demak disusun dengan dasar pada program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026. Secara ringkas program unggulan Pembangunan daerah yang akan mendukung masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan harmonisasi dan fasilitas kehidupan beragama;
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis “*Smart City*”;
3. Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah;
4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
5. Pengembangan inovasi daerah;
6. Perluasan Kawasan perkotaan;
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Terutama Di Kawasan Pesisir, Pertanian Dan Pusat Pertumbuhan/ Pusat Produksi;
8. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat;
9. Peningkatan keberdayaan perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Program unggulan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis “*Smart City*”, Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah, Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Perluasan Kawasan perkotaan, dan Percepatan Pembangunan.

Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mendukung program unggulan peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah melalui gerakan kali bersih dengan kegiatan melaksanakan normalisasi Sungai di wilayah perkotaan. Program unggulan percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/ pusat produksi dilaksanakan dengan kegiatan pembuatan masterplan penanganan banjir dan rob terpadu didukung dengan kegiatan pembangunan pintu air, peningkatan pintu air/bending pengendali banjir, perbaikan tanggul sungai di kawasan rob, normalisasi sungai serta koordinasi dan monev. Kegiatan rehabilitasi tanggul dilakukan dengan cara perbaikan tanggul sungai, normalisasi sungai serta pemantauan tanggul kritis. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dilaksanakan dengan kegiatan perencanaan pengelolaan SPAM dan Pembangunan SPAM. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)/ sanitasi dilaksanakan dengan Pembangunan SPAL/sanitasi dan pemeliharaan SPAL/sanitasi. Rencana program prioritas dan rencana implementasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2025

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Akhir (2020)	REALISASI s.d 2023		PROYEKSI 2024		TARGET 2025		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS 'SMART CITY'												
f	Mall Pelayanan Publik (MPP)	Jumlah layanan yang beroperasi di Mall Pelayanan Publik	unit										
5	Pembangunan gedung MPP	Gedung MPP yang terbangun	unit		1	5.857.192.750						1.03.08.2.01.0021	
3	PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH												
d	Gerakan kali bersih	Panjang sungai di wilayah perkotaan yang terjaga kebersihannya		0									
2	Normalisasi sungai di wilayah perkotaan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi			8,355	3.200.000.000	2,094	400.000.000	2,1	2.000.000.000	2,1	1.03.02.2.01.0093	
6	PERLUASAN KAWASAN PERKOTAAN												

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Akhir (2020)	REALISASI s.d 2023		PROYEKSI 2024		TARGET 2025		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	Penyusunan masterplan perluasan kawasan perkotaan	masterplan perluasan kawasan perkotaan yang tersusun											
1	Masterplane perluasan kawasan perkotaan Demak	Dokumen Masterplan yang tersusun										1.03.12.2.01.0011	
c	Pembangunan perluasan kawasan perkotaan	Jumlah lokasi perluasan kawasan perkotaan yang ditata											
1	Penyusunan DED Perluasan Kawasan Perkotaan	Jumlah DED tersusun			2	248.311.210							
2	Pembangunan landmark	Landmark terbangun										1.03.08.2.01.0021	
7	PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, TERUTAMA DI KAWASAN PESISIR, PERTANIAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN/ PUSAT PRODUKSI												

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Akhir (2020)	REALISASI s.d 2023		PROYEKSI 2024		TARGET 2025		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten	Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap											
1	Perencanaan pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan		13	39	1.427.391.975			23	1.152.000.000	24	1.03.10.2.01.0029	
2	Pembangunan jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik		414,738	415.692	172.433.100.650			1	5.000.000.000	2	1.03.10.2.01.0032	
3	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi		4,341	10.740	6.210.975.821			3	5.000.000.000	3	1.03.10.2.01.0044	
4	Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik		4	20	25.976.057.850		16.700.000.000	1	6.000.000.000	1	1.03.10.2.01.0040	
5	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang terehabilitasi		7	7	1.565.869.350	5	1.490.625.000	2	2.205.000.000	2	1.03.10.2.01.0039	
6	Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun			36	83.153.746.392		7.650.000.000	5,5	17.500.000.000	6,25	1.03.10.2.01.0032	

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Akhir (2020)	REALISASI s.d 2023		PROYEKSI 2024		TARGET 2025		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
c	Penanganan banjir dan rob	Luas kawasan terdampak banjir dan rob yang ditangani											
1	Pembuatan masterplan penanganan banjir dan rob terpadu	Jumlah dokumen perencanaan teknis konstruksi		-	4	197.419.050	8	550.000.000	-	-	-	1.03.02.2.01.0120	
2	Pembangunan pintu air	Jumlah pintu air pengendali banjir yang terbangun		-	2	398.282.000	-	-	-	-	-	1.03.02.2.01.0125	
3	Rehabilitasi pintu air	Jumlah pintu air pengendali banjir yang terehabilitasi		4	16	586.603.200	4	750.000.000	5	1.000.000.000	5	1.03.02.2.01.0026	
4	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air pengendali banjir yang ditingkatkan kapasitasnya		-	5	597.152.000	5	560.000.000	3	660.000.000	-	1.03.02.2.01.0100	
5	Pembangunan stasiun pompa banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang terbangun		-	2	1.242.409.850	1	800.000.000	1	500.000.000	-	1.03.02.2.01.0013	
6	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yang terpelihara		-	-	-	-	-	3	75.000.000	4	1.03.02.2.01.0085	
7	Perbaikan tanggul sungai di kawasan rob	Panjang tanggul kritis saluran / sungai yang terehabilitasi		325	311	212.114.950	796	890.000.000	180	700.000.000	180	1.03.02.2.01.0126	
8	Normalisasi sungai	Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi		33	17.146	10.460.182.000	420	600.000.000	1.400	1.800.000.000	1.400	1.03.02.2.01.0093	

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Akhir (2020)	REALISASI s.d 2023		PROYEKSI 2024		TARGET 2025		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Koordinasi dan monev	Jumlah rapat koordinasi pengelolaan SDA yang dilaksanakan		-	5	980.573.000	20	400.000.000	3	150.000.000	3	1.03.02.2.02.0030	
10	Perbaikan jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik			303.266	17.228.752.800			800	4.000.000.000	1	1.03.10.2.01.0032	
11	Perbaikan jembatan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi			0,24	398.729.000			0	1.400.000.000	0,09	1.03.10.2.01.0039	
f	Rehabilitasi tanggul sungai	Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi		325									
1	Perbaikan tanggul sungai	Panjang tanggul kritis saluran / sungai yang terehabilitasi		325	30.625	586.251.500	90	400.000.000	180	700.000.000	180	1.03.02.2.01.0126	
2	Normalisasi sungai	Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi		33	24.060	2.220.217.000		1.600.000.000	1.400	1.800.000.000	1.400	1.03.02.2.01.0093	
3	Pemantauan tanggul kritis	Panjang tanggul dimonitoring			5.000	8.400.000			5.000	50.000.000	5.000	1.03.02.2.01.0126	
g	Penataan trotoar dan drainase kota	Panjang drainase kota dalam kondisi baik											
1	Penyusunan dokumen perencanaan drainase perkotaan	Dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan		2	-	-			1	100.000.000	1	1.03.06.2.01.0030	
2	Rehabilitasi drainase kota	Panjang drainase terehabilitasi		470	675	227.212.500			675	300.000.000	675	1.03.06.2.01.0028	
3	Operasi dan Pemeliharaan Drainase	Panjang saluran drainase perkotaan yang		4,55	11.673	1.319.509.092			750	300.000.000	750	1.03.06.2.01.0031	

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Akhir (2020)	REALISASI s.d 2023		PROYEKSI 2024		TARGET 2025		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		terpelihara											
4	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun			-	-		100.000.000	4.500	4.500.000.000	1.250	1.03.06.2.01.0029	
h	Sistem pengelolaan air minum (SPAM)	Persentase masyarakat yang terlayani air minum											
1	Perencanaan pengelolaan SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM			70	328.551.630	1	20.000.000	1	500.000.000	1	1.03.03.2.11.0025	
2	monev SPAM	Jumlah dokumen supervisi			69	548.000.000	1	308.000.000			-		
3	Pembangunan SPAM	Jumlah Sambungan Rumah terbangun			1.695	11.142.741.378	75	750.000.000	1.600	8.000.000.000	1.600	1.03.03.2.01.0028	
4	Peningkatan SPAM	Jumlah Sambungan Rumah terbangun			7.201	36.213.950.000	889	8.889.565.000	2.000	10.000.000.000	2.800	1.03.03.2.01.0026	
i	Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi layak											
1	Perencanaan pengelolaan SPAL/sanitasi	Jumlah dokumen perencanaan sistem pengelolaan air limbah			11	457.843.021	1	404.000.000	1	500.000.000	1	1.03.05.2.01.0041	

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Akhir (2020)	REALISASI s.d 2023		PROYEKSI 2024		TARGET 2025		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Pembangunan SPAL/sanitasi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki septik			4.564	27.002.288.578	1.921	13.449.000.000	714	5.000.000.000	937	1.03.05.2.01.0039	
3	Pemeliharaan SPAL/sanitasi	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang terpelihara			1.055	1.350.067.550	675	300.000.000	500	500.000.000	500	1.03.05.2.01.0038	
4	Sosialisasi masyarakat	jumlah rumah tangga belum memiliki tangki septik yang ikut sosialisasi			1.000	68.350.000			1.000	100.000.000	1.000	1.03.05.2.01.0040	
5	Pembangunan IPLT	Jumlah IPLT terbangun			1	1.993.386.860					-		
j	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang Tersedia dan Terpelihara		325									
3	Peningkatan jalan menuju objek wisata	Panjang jalan ke arah objek wisata dalam kondisi baik			232	3.488.909.127	55	300.000.000	200	1.000.000.000	320	1.03.10.2.01.0032	

BAB V.

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arahan kebijakan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar Masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia, oleh karena itu perlu adanya dukungan anggaran guna memenuhi pencapaian pembangunan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan melalui dana APBD Kabupaten, Bantuan Keuangan (Provinsi), APBN (DAK dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dan Swasta.

5.2. Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021- 2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renja DINPUTARU) Kabupaten Demak tahun 2025.

Rancangan Akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini memuat hal - hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang;

2. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun bersumber dari APBN;
3. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak juga sangat bergantung kepada keseriusan segenap unsur *internal* dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada tahun anggaran berjalan atau Akhir 2025, seluruh kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Lampiran 1.

PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026

DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%
						Terlaksananya pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	%							Terlaksananya pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	%
1	3	1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	3	1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen
1	3	1	2. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	3	1	2. 01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
1	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan		1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1	3	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	3	1	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
1	3	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
1	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi		1	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Laporan
1	3	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	3	1	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen
1	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	%

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	3	1	2. 05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	3	1	2. 05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket
1	3	1	2. 05	9	Pendidikan dan Pelatihan dan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	3	1	2. 05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan dan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
1	3	1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		1	3	1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%
1	3	1	2. 06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3	1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
1	3	1	2. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3	1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
1	3	1	2. 06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3	1	2. 06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
1	3	1	2. 06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	3	1	2. 06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3	1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
1	3	1	2. 06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen	1	3	1	2. 06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen
1	3	1	2. 06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	3	1	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
1	3	1	2. 06	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	3	1	2. 06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
1	3	1	2. 06	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	3	1	2. 06	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
1	3	1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan		1	3	1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	3	1	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
1	3	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		1	3	1	2.07	0003	Pengadaan alat besar	Tersedianya alat besar	Jumlah Unit Alat Besar yang disediakan	Unit
1	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	3	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket
1	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3	1	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
1	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3	1	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia		1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	%
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	3	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	3	1	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara		1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	3	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	3	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	3	1	2. 09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	1	3	1	2. 09	00 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit
1	3	1	2. 09	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	3	1	2. 09	00 05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
1	3	1	2. 09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1	3	1	2. 09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
1	3	1	2. 09	9	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit	1	3	1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit
1	3	1	2. 09	1 0	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit	1	3	1	2. 09	00 10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit
1	3	1	2. 09	1 1	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit	1	3	1	2. 09	00 11	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	0 3	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	1	0 3	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%
1	0 3	0 2	2. 01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan rawan banjir yang terlindungi	km ²	1	0 3	0 2	2. 01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan rawan banjir yang terlindungi	km ²
1	3	2	20 1	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Permukiman, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokume n	1	0 3	0 2	2. 01	01 20	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokume n
1	3	2	20 1	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	1	0 3	0 2	2. 01	01 21	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit
1	3	2	20 1	1	Pembangunan Pintu air/ bendung pengendali banjir	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit	1	0 3	0 2	2. 01	01 25	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit
1	3	2	20 1	1 3	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit	1	0 3	0 2	2. 01	00 13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	3	2	20 1	2 1	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	1	0 3	0 2	2. 01	01 14	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit
1	3	2	20 1	2 4	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM	1	0 3	0 2	2. 01	01 26	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Km
1	3	2	20 1	2 6	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	1	0 3	0 2	2. 01	00 26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1	3	2	20 1	3 6	Peningkatan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Unit	1	0 3	0 2	2. 01	01 00	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Unit
1	3	2	20 1	4 6	Normalisasi/Rest orasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/D irestorasi	KM	1	0 3	0 2	2. 01	00 93	Normalisasi/Rest orasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Rest orasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/D irestorasi	KM
1	3	2	20 1	4 9	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	0 3	0 2	2. 01	00 89	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	3	2	20 1	5 5	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	0 3	0 2	2. 01	00 85	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	3	2	20 1	5 8	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Beroperasi dan Terpeliharanya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	0 3	0 2	2. 01	00 83	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Beroperasi dan Terpeliharanya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	3	2	20 1	6 1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	0 3	0 2	2. 01	00 75	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga
1	3	2	20 1	6 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang									
1	3	2	20 2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Hektar	1	0 3	0 2	2. 02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Hektar
				1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	1	0 3	0 2	2. 02	00 35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen
				2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi	KM	1	0 3	0 2	2. 02	00 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang	KM

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
							Permukaan yang Dibangun									Dibangun	
				5	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	KM	1	0 3	0 2	2. 02	00 05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	KM
				1 1	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Meningkatnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	KM	1	0 3	0 2	2. 02	00 11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Meningkatnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	KM
				1 4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	1	0 3	0 2	2. 02	00 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM
				1 5	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendun g	1	0 3	0 2	2. 02	00 15	Rehabilitasinya Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendun g
				1 7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	KM	1	0 3	0 2	2. 02	00 17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	KM
				2 1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	1	0 3	0 2	2. 02	00 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
				2 2	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendun g	1	0 3	0 2	2. 02	00 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendun g

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
				2 4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	1	0 3	0 2	2. 02	00 24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
									1	0 3	0 2	2. 02	00 30	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembag a
1	0 3	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum	%	1	0 3	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum	%
1	0 3	0 3	2. 01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga memperoleh layanan air minum	Rumah Tangga	1	0 3	0 3	2. 01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga memperoleh layanan air minum	Rumah Tangga
1	0 3	0 3	2. 01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokume n	1	0 3	0 3	2. 01	00 25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokume n

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	0 3	0 3	2. 01	2	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimali sasi SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimali sasi SPAM	Dokume n									
1	0 3	0 3	2. 01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	1	0 3	0 3	2. 01	00 28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/De tik
1	0 3	0 3	2. 01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah sambungan rumah yang ditingkatkan	SR	1	0 3	0 3	2. 01	00 26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Ko	Liter/De tik
1	0 3	0 5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi		1	0 3	0 5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi	%

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	0 3	0 5	2. 01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga memperoleh layanan air limbah domestik		1	0 3	0 5	2. 01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga memperoleh layanan air limbah domestik	Rumah Tangga
1	0 3	0 5	2. 01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokume n	1	0 3	0 5	2. 01	00 41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokume n
1	0 3	0 5	2. 01	6	Pembangunan/P enyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tebangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	1	0 3	0 5	2. 01	00 39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga
1	0 3	0 5	2. 01	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompo k	1	0 3	0 5	2. 01	00 40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	0 3	0 5	2. 01	1 0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	1	0 3	0 5	2. 01	00 38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	0 3	0 6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEM BANGAN SISTEM DRAINASE	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun		1	0 3	0 6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEM BANGAN SISTEM DRAINASE	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun	Nilai
1	0 3	0 6	2. 01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik		1	0 3	0 6	2. 01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik	%
1	0 3	0 6	2. 01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokume n	1	0 3	0 6	2. 01	00 30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokume n
1	0 3	0 6	2. 01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	m	1	0 3	0 6	2. 01	00 29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainas e Perkota an

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	0 3	0 6	2. 01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	1	0 3	0 6	2. 01	00 28	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan
1	0 3	0 6	2. 01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	m	1	0 3	0 6	2. 01	00 31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan
1	0 3	0 8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan berizin		1	0 3	0 8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan berizin	Angka
1	0 3	0 8	2. 01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan gedung dalam kondisi baik		1	0 3	0 8	2. 01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan gedung dalam kondisi baik	Angka

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	0 3	0 8	2. 01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0 3	0 8	2. 01	00 21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	0 3	0 8	2. 01	1 3	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya dan Terawatnya Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	1	0 3	0 8	2. 01	00 18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung
1	0 3	1 0			PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap		1	0 3	1 0			PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%
1	0 3	1 0	2. 01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik		1	0 3	1 0	2. 01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	m

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	03	10	201	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	1	03	10	201	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen
1	03	10	201	5	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	1	03	10	201	0032	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	km
1	03	10	201	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Meningkatnya Lebar Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM	1	03	10	201	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	km
1	03	10	201	8	Rekonstruksi jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	1	03	10	201	0033	Rekonstruksi jalan	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruks	km
1	03	10	201	9	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	1	03	10	201	0044	Rehabilitasi Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	km
1	03	10	201	12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	m	1	03	10	201	0040	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan
1	03	10	201	16	Penggantian Jembatan	Tergantinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m	1	03	10	201	0031	Penggantian Jembatan	Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan
1	03	10	201	18	Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	1	03	10	201	0039	Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	KM
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan		1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan	%
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan tenaga konstruksi		1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan tenaga konstruksi	Kali
1	03	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	0 3	1 2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Luas alih fungsi lahan		1	0 3	1 2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Luas alih fungsi lahan	Angka
1	0 3	1 2	2. 01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen RTR		1	0 3	1 2	2. 01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen RTR	Dokume n
1	0 3	1 2	2. 01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokume n	1	0 3	1 2	2. 01	00 11	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokume n
1	0 3	1 2	2. 01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	Dokume n	1	0 3	1 2	2. 01	00 12	Sosialisasi Peraturan Peraturan- undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Tersampaianny a substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang
1	0 3	1 2	2. 02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1	0 3	1 2	2. 02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokume n

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUB	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	0 3	1 2	2. 02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten /Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0 3	1 2	2. 02	00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	0 3	1 2	2. 04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1	0 3	1 2	2. 04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	0 3	1 2	2. 04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	0 3	1 2	2. 04	00 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen
2	1 0	1 0			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terlaksananya Penatagunaan Tanah	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat	%	2	1 0	1 0			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terlaksananya Penatagunaan Tanah	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat	%
2	1 0	1 0	2. 01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tanah pemkab bersertifikat	Bidang	2	1 0	1 0	2. 01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tanah pemkab bersertifikat	Bidang

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUBUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2	1 0	1 0	2. 01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1 0	1 0	2. 01	00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen